

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TAHUN 2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD FAKHRUDIN
NIM 103200033**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP 197602292008011008**

**IAIN
P O N O R O G O**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TAHUN 2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD FAKHRUDIN
NIM 103200033

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP 197602292008011008

IAIN
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fakhruddin
Nim : 103200033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 4 Maret 2024

Mengetahui

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Tata Negara



Martha Eri Safira, S.H., M.H.
NIP 198207292009012011

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fakhrudin
NIM : 103200033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Skripsi ini dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 5 April 2024

Dan setelah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

Ketua sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Penguji 2 : Dr. Abid Romhanu, M.H.I.



Ponorogo 22 April 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhruddin
NIM : 103200033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Maret 2024



Muhammad Fakhruddin
NIM 103200033



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhruddin
NIM : 103200033
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 4 Maret 2024



Muhammad Fakhruddin
NIM 103200033

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali-Imran : 103).¹



¹ “Surat Ali ‘Imran Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 1, 2024, <https://tafsirweb.com/1235-surat-ali-imran-ayat-103.html>.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Yon Baudin dan Ibu Faridatul Mufarrokhah) yang telah banyak memberikan do'a serta masukanya, dan yang paling utama selalu mengingatkan saya untuk sholat tepat waktu.
2. Adik-adiku (Almh. Dinda Fitri Azzahra) dan Zulfa Zaidatu Trimufida yang sudah banyak mendoakan serta membagi waktunya untuk membantuku setiap saat seiring menuju tahap akhir ini, dan semoga kalian kedepanya menjadi seseorang yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Swt.
3. Keluarga besar civitas akademika IAIN Ponorogo (Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Dosen Pembimbing Skripsi/Akademik) dengan segala kontribusi yang telah diberikan secara maksimal selama 4 tahun.
4. Keluarga besar mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan satu IAIN Ponorogo yang telah banyak membantu, menemani, dan berbagi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat selama hampir 4 tahun.
5. Keluarga besar UKM Bela Diri (PSHT Komisariat IAIN Ponorogo), UKM Olahraga IAIN Ponorogo, dan berbagai Komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi sebagian kisah pengalaman dalam proses pengembangan diri saya di kampus ini.

ABSTRAK

Fakhrudin, Muhammad 2023. *Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyāsah*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci/Keyword : *Politik Identitas, Pemilihan Gubernur, Fiqh Siyāsah*

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tentang keabsahan politik identitas yang merujuk pada organisasi keagamaan (Muslimat NU) dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 prespektif *fiqh siyāsah*. Latar belakang persoalan ini berawal dari adanya kegelisahan mengenai pro dan kontra akan kebolehan dan larangan tentang politik identitas yang secara hukum Islam terdapat pembenaran dan penyalahan terhadap praktik politik identitas. Selain itu secara normatif belum adanya aturan yang spesifik mengatur tentang hal ini sehingga menjadikan kepastian hukum politik identitas kembali dipertanyakan.

Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini pada intinya menanyakan bagaimana tinjauan politik identitas terhadap peran organisasi keagamaan dalam menggalang massa oleh calon Gubernur Jawa Timur saat itu, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* dalam menilai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh organisasi keagamaan (Muslimat NU) tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian pustaka yang sifatnya yuridis normatif, dengan menggunakan hukum sebagai parameter utama. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi, yang diproses dengan cara *editing, organizing*, dan penemuan hasil, dengan metode analisisnya yaitu deskriptif normatif.

Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, pertama sesuai paparan data sebelumnya adanya peran serta yang dilakukan oleh Muslimat NU tersebut sejatinya dapat disebut sebagai politik identitas. Sebab organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang awalnya independan dapat masuk kategori politik identitas apabila secara terang-terangan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan juga mengambil untung dengan menggerakkan komunitasnya sebagai alat untuk menggalang massa. Analisis selanjutnya terhadap tinjauan *fiqh siyāsah* dapat disimpulkan bahwa, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh organisasi keagamaan (Muslimat NU) dalam partisipasinya mendukung paslon nomor urut satu sebagian besar memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai *fiqh siyāsah* yang mengemban prinsip *siyāsah syar'iyah*, toleransi dalam politik Islam, dan demokrasi yang menghendaki adanya kebebasan berserikat dengan batas-batas moral yang tidak menyalahi prinsip syariat. Namun ada beberapa bentuk kampanye yang secara tinjauan *fiqh siyāsah* sedikit bertentangan dengan nilai persamaan yang dapat menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, seperti adanya fatwa fardhu 'ain yang dikeluarkan oleh masyaikh untuk warga Jawa Timur guna memilih Khofifah-Emil saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis pajatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif *Fiqh Siyāsah*”. Shalawat dan sallam senantiasa tercurahkan kepada uswatun khasanah kita Nabi Agung Muhammad Saw, semoga atas kecintaan kita terhadap beliau kelak nanti akan berjumpa dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiamah.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil, yang oleh karena itu penulisan skripsi ini selesai. Tentang hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

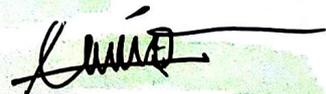
1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan perhatian dan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta ini.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan Skripsi ini.
3. Martha Eri Safira, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang banyak memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan membuka jalan pikiran baru kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik juga maksimal.
5. Bapak dan Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan untuk penulis. Dengan adanya skripsi ini yang di niatkan lillahita'ala, semoga dapat menambah ketaqwaan dan keimanan kita sekaligus semangat kita dalam menuntut ilmu kedepanya.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 4 Maret 2024



Muhammad Fakhruddin
NIM 103200033



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut pedoman baku untuk transliterasi dari huruf arab ke huruf latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʾ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	ʿ	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	و	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	ه	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. ṣ
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh:
Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah
4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan *inna al-dīna* ‘inda Allāhi al-Islāmu.

Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Āmmah.

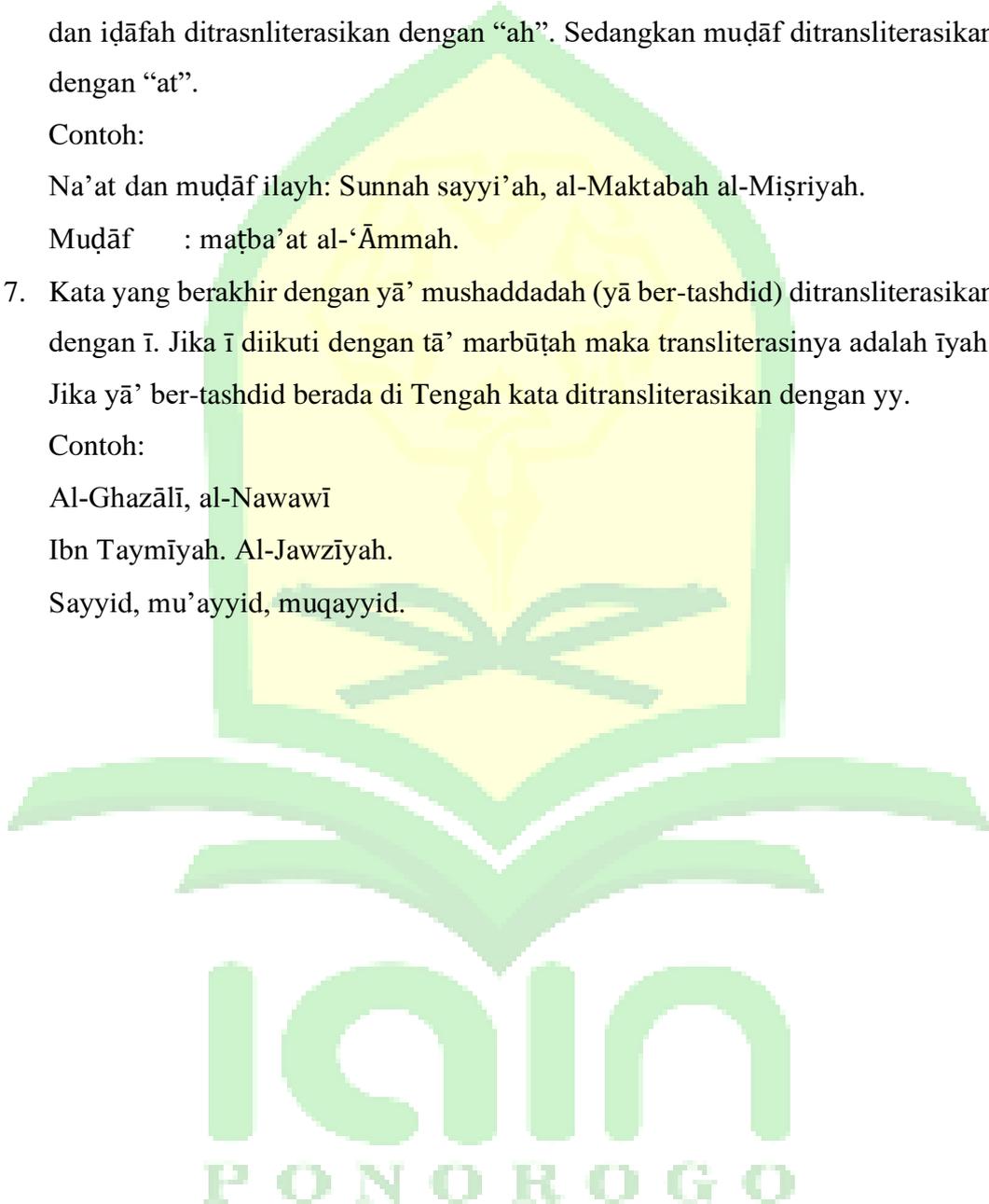
7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah iyah. Jika yā’ ber-tashdid berada di Tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data.....	13

3. Teknik Dokumentasi.....	15
4. Analisis Data.....	15
5. Pengecekan Keabsahan Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP POLITIK IDENTITAS MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	18
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	18
B. Politik Identitas di Indonesia	34
C. Partisipasi Politik.....	42
BAB III PERAN SERTA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PROSES PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	46
A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian	46
1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	46
2. Kondisi Sosial Politik Jawa Timur mendekati Pilgub Jatim 2018.....	48
3. Pilkada Jawa Tmur Tahun 2018	55
4. Peran Muslimat NU dalam Pemenangan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	61
B. Peran Organisasi Keagamaan Sebagai Bentuk Upaya Menggalang Masa Oleh Seorang Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	73
C. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Peran Organisasi Keagamaan Sebagai Bentuk Upaya Menggalang Massa Oleh Seorang Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	80
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Pilkada Jatim 2018	56
Tabel 3. 2 Keterlibatan Muslimat NU dalam Pemenangan Khofifah-Emil.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Relawan Muslimat NU Kota Surabaya	67
Gambar 3. 2 Ulama dan Muslimat Deklarasikan Dukung Khofifah.....	67
Gambar 3. 3 Khofifah Bersama Jamaah Muslimat di Mojokerto	68
Gambar 3. 4 Khofifah Bersama Muslimat dan Fatayat Jombang	68
Gambar 3. 5 Fatwa Fardhu ‘ain Memilih Khofifah	69
Gambar 3. 6 Spanduk Fatwa Fardhu ‘ain dukung Khofifah 1	69
Gambar 3. 7 Spanduk Fatwa Fardhu ‘ain dukung Khofifah 2	70
Gambar 3. 8 Hasil Screenshot Sumber Data	70
Gambar 3. 9 Hasil Screenshot Sumber Data	71
Gambar 3. 10 Hasil Screenshot Sumber Data	71
Gambar 3. 11 Hasil Screenshot Sumber Data	72
Gambar 3. 12 Hasil Screenshot Sumber Data	72
Gambar 3. 13 Hasil Screenshot Sumber Data	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menegaskan pilihannya tersebut dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 dan 3. Dalam konsep negara hukum segala aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara haruslah berdasar pada hukum yang berlaku saat itu. Sejalan dengan konsep demokrasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan selalu dilibatkan dalam setiap proses kehidupan bernegara secara menyeluruh tanpa terkecuali.¹

Dalam perkembangannya, konsep perwujudan demokrasi di Indonesia saat ini setidaknya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan demokrasi ialah seperti budaya politik, kekuatan-kekuatan politik, dan perilaku aktor politik. Semuanya ini yang menyebabkan demokratisasi berjalan konsisten lebih dinamis/berkembang mengikuti zaman.² Sebab seiring berkembangnya zaman yang terus maju dan berkembangnya kebijakan yang baru, otomatis perubahan kehidupan masyarakat juga akan mengikuti.

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," *Fiat Justisia*, Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2011): 3.

² Alifia Silvi Fatiha and Wahyuningsih Santosa, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 3.

Demi menjaga demokrasi ini tetap terjaga, negara Indonesia pastinya mempunyai cara-cara untuk mempertahankannya. Misalnya seperti pelaksanaan Pemilihan Umum, yang berdasar dari UU No. 7 Tahun 2017. Tidak hanya Pemilu, konsep demokrasi untuk membatasi kekuasaan juga diterapkan dalam lingkup daerah. Contohnya dengan adanya Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah yang memilih Gubernur, Wali Kota dan Bupati sebagai wakil di setiap daerah administratif berdasar dalam UU No. 10 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Pilkada secara bertahap dilaksanakan pada seluruh daerah administratif di Indonesia, yang salah satunya terjadi di Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini merupakan daerah yang paling strategis dan banyak memberi pengaruh peradaban agama Islam di nusantara. Perhelatan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Jawa Timur menjadi salah satu momen yang mendapat perhatian khusus di tingkat nasional, berbagai media pun ikut menyorot setiap kegiatan politik calon Gubernur maupun Wakilnya. Pemberitaan isu tersebut biasanya melalui surat kabar daring seperti Tempo, Detik, Kompas, Jawa Pos, Republika, Tribun, dan sejenisnya.³ Pentingnya media informasi secara aktual juga bisa menjadi jejak digital sekaligus referensi penelitian di masa depan.

Pada saat Pemilihan Gubernur Jatim 2018 lalu, setidaknya ada dua paslon yang secara sah maju sebagai calon Gubernur. Paslon nomor satu di tempati oleh Khofifah Indar Parawansa bersama Wakilnya Emil Elistianto Dardak. Sementara paslon nomor dua di tempati oleh Saifullah Yusuf (Gus Ipul)

³ Nur Hamidah Zulaikha, "Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 Pada Situs Berita Daring Indonesia," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, (2019), 4.

bersama dengan Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti). Majunya Khofifah-Emil dalam Pilgub kali ini diusung oleh partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, dan Hanura Jatim. Adapun paslon nomor dua Saifullah-Puti, yang dipimpin langsung oleh tim suksesnya yaitu Hikmah Bafaqih setidaknya diusung oleh partai PDIP, Gerindra, PKS, dan PKB.⁴

Seperti yang diketahui, akhir dari kontestasi Pilgub Jatim tahun 2018 yang lalu dimenangkan oleh pasangan Khofifah dan Emil Dardak, yang selanjutnya berhak menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Pada proses kampanye Pilgub kali ini, Khofifah-Emil dan tim suksesnya telah membangun narasi kampanyenya pada berbagai isu, termasuk yang jadi sorotan terkait penggunaan identitas dalam politik seperti budaya, gender dan agama dalam kampanyenya.

Berbicara tentang politik identitas, sederhanya dapat diartikan sebagai suatu kegiatan politik yang didasarkan pada identitas individu dan kelompok seperti suku, ras, agama, dan lain-lain. Politik identitas pada dasarnya menganut kesetaraan atas dasar kesamaan di bidang tertentu, maknanya dalam hal ini identitas yang digunakan sebagai alat politik dapat dikategorikan sebagai politik identitas secara umum. Hal itu sudah menjadi syarat umum karena dalam negara majemuk yang memiliki banyak identitas politik di dalamnya, tidak heran apabila masalah identitas selalu terkait kepada proses politik praktis yang berjalan saat ini.

⁴ Kominfo Prov. Jawa Timur, "KPU Jatim Resmi Tetapkan Dua Pasangan Cagub dan Cawagub 2018," dalam, n.d., <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-resmi-tetapkan-dua-pasangan-cagub-dan-cawagub-2018>, (diakses pada tanggal 19 oktober 2023)

Kemenangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 lalu dalam berbagai surat kabar juga menyebutkan tidak terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan. Contoh halnya seperti komunikasi politik dengan berbagai tokoh dari Nahdlatul Ulama dan banyak juga implikasi yang menyebut adanya segmentasi dukungan dari organisasi Muslimat NU yang secara aktif mendukung pasangan Khofifah-Emil. Muslimat NU yang memiliki basis anggota yang besar dengan semangat solidaritas antar anggotanya tentu dapat menjadi aspek yang dapat mempengaruhi kemenangan suara Khofifah-Emil. Misalnya dengan menggelorakan massa, memperkuat imaji tokoh politik, berkampanye bersama media, melalui majelisan ta'lim, berintegrasi bersama kelompok non-Muslim, dan siasat mengatasi tema-tema kampanye buruk, serta siasat pemantauan dan perlindungan suara.⁵

Di antara itu segmen pemilih perempuan juga menjadi pengaruh besar terhadap lonjakan suara yang diperoleh, tercatat ada 59% untuk Khofifah karena mendapatkan dukungan dari muslimat NU. Melihat efek potensi pemilih yang begitu besar menurut data dari KPU Jatim, pemilih perempuan ada 51% dan milenial 31%. Sedangkan berdasar pada website NU tahun 2018 pemilih dari jamaah NU sendiri sekiranya terdapat 60% pemilih dan berdasarkan pada poltracking jumlah pemilih rasional hanya berjumlah 49%.⁶

⁵ Fatikh Fauzal Adhim, "Kinerja Muslimat NU Jawa Timur Dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018" (2019), 1, <https://repository.unair.ac.id/88075/>.

⁶ Ranny Winda Kartika Sari, "Strategi Pemasaran Politik Pasangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018," *Jurnal Eduksos*, 2018, 7, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmfb16e5a611full.pdf>.

Seperti yang diketahui, Khofifah dan Emil merupakan seorang figur yang terbentuk dan berkembang lewat organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Khofifah tercatat dalam rekam jejaknya di NU, dia mengawali kiprahnya selaku anggota IPPNU, Fatayat dan saat ini menjabat Ketum Muslimat NU. Adapun Wakilnya yaitu Emil Dardak banyak disebutkan menjabat sebagai Direktur Kebudayaan di NU. Setelah dia menyelesaikan studinya di negara Jepang, Emil Dardak menjadi salah satu pelopor eksistensi cabang khusus NU di negeri Matahari Terbit (Jepang).⁷

Faktor yang mempengaruhi mulusnya kemenangan Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim 2018 tak lepas dari loyalitas umat Islam NU. Organisasi otonom Nahdlatul Ulama ini tetap setia mendukung Khofifah meski kalah dua kali di kompetisi yang sama. Menurut Dwi Astuti, Sekretaris Muslimat NU Jatim, NU Muslimat benar-benar organisasi yang loyal. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Tim Pemenangan Khofifah, M. Roziqi. Menurutnya Muslimat NU adalah organisasi yang kuat dan Khofifah, selaku Ketua NU Muslimat, berhasil mendorong anggotanya untuk mendukungnya pada Pilgub Jatim 2018.⁸

Sejalan dengan itu, pesan yang disampaikan oleh Masruroh Wahid selaku Ketua Muslimat cabang Jawa Timur, dengan tim Kumparan Surabaya menyebutkan bahwa, bagi umat Islam NU Jatim, mendukung Khofifah adalah

⁷ “Kiai NU Gresik Totalitas Dukung Khofifah-Emil di Pilgub 2018,” dalam *Tribunnews.com*, March 1, 2018, <https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/01/kiai-nu-gresik-totalitas-dukung-khofifah-emil-di-pilgub-2018>, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023).

⁸ Silkania Swarizona and Riaty Raffudin, “Keterlibatan Jaringan Muslimat NU Dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa Di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” *LITERATUS* 3, no. 1 (April 15, 2021): 4.

untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan itu dia bahkan berani untuk bersebrangan atas partainya sendiri, yaitu PKB, yang menyokong Saifullah Yusuf. Beliau mengatakan “Tidak peduli PKB, PPP, atau PDIP, saya tidak peduli, Muslimat tidak menganggap partai sebagai sesuatu, yang terpenting bu Khofifah adalah Ketum kita semua.”⁹

Secara sosiologis politik identitas kenyataannya tidak terlalu menjadi perhatian oleh mayoritas rakyat Indonesia, dikarenakan sifatnya masih samar dan dianggap perilaku biasa dalam konteks politik. Akan tetapi keberadaan politik identitas secara normatif juga bisa dikatakan belum secara jelas dilarang dengan konsekuensi yang matang. Misalnya di dalam pasal 69 UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang biasa disebut sebagai aturan yang mengatur batasan-batasan politik identitas juga tidak terlalu spesifik menjelaskan batas-batas politik identitas itu dilakukan.

Selanjutnya, dalam persepsi hukum Islam modern politik identitas umumnya masuk dalam ranah pengaturan *fiqh siyāsah*, kajian ini mengkaji masalah politik, ketatanegaraan, sampai hubungan warga negara maupun hubungan internasional. Dalam beberapa literatur banyak yang menyebutkan secara tegas bahwa politik identitas adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, apabila hal tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi nilai-nilai keadilan serta menjauhkan dari prinsip dan semangat agama Islam yang cinta akan

⁹ Anggi Kusumadewi Ulfa Rahayu, Rina Nurjannah, “Manuver Garang Muslimat NU di Timur Jawa,” kumparan, accessed November 1, 2023, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303>, (diakses pada tanggal 1 November 2023).

perdamaian. Namun di sisi lain politik identitas juga banyak ditafsiri sebagai sesuatu hal yang biasa dalam perpolitikan di negara majemuk. Fokus kajian terhadap pro dan kontra penggunaan Muslimat NU dalam kampanye di Pilgub Jatim tahun 2018 apakah bisa disebut sebagai politik identitas secara luas, tentunya dari data keterangan di atas dapat disimpulkan demikian.

Menguatnya jejaring Muslimat NU tentu sangat bermanfaat bagi paslon Khofifah-Emil saat itu. NU sebagai organisasi keagamaan tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak mendukung calon peserta Pemilu. Hanya secara kultural dan tidak resmi tokoh-tokoh NU di Jawa Timur dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu,¹⁰ Keterlibatan Muslimat NU secara tidak langsung berdampak pada kemenangan Khofifah dan Emil. Tanpa kita sadari di mata masyarakat secara menyeluruh, faktor organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk kampanye informal yang terbangun melalui kelompok sosial keagamaan tertentu yang itu memicu rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial.

Mengingat luasnya bahasan tentang politik identitas, maka penulis akan memfokuskan pada salah satu isu tentang organisasi keagamaan Muslimat NU yang berperan dalam proses penggalangan massa oleh calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Politik identitas yang mengacu pada kelompok organisasi keagamaan secara prinsip memiliki ketentuan hukum yang berbeda, sebab itu telaah yang digunakan penulis dalam penelitian ini tertuju pada tinjauan *fiqh siyāsah* sebagai tolak ukur dan interpretasi pembahasan. Alasanya

¹⁰ Administrator, "Pilgub Jatim dan Politik Agama - Jawa Pos," Pilgub Jatim dan Politik Agama - Jawa Pos, dalam November 24, 2017, <https://www.jawapos.com/sudut-pandang/01129577/pilgub-jatim-dan-politik-agama>, (diakses pada tanggal 28 November 2023).

dalam nilai-nilai dasar ini terkandung prinsip seperti *siyāsah syar'iyah*, demokrasi politik dalam Islam, toleransi politik dalam Islam, prinsip Piagam Madinah, dan ditambah teori tentang politik identitas dan partisipasi politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan motif latar belakangnya, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tinjauan politik identitas terhadap peran organisasi keagamaan sebagai bentuk upaya menggalang massa oleh seorang calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018 ?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran organisasi keagamaan sebagai bentuk upaya menggalang massa oleh seorang calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahannya, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan politik identitas terhadap peran organisasi keagamaan sebagai bentuk upaya menggalang massa oleh seorang calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap peran organisasi keagamaan sebagai bentuk upaya menggalang massa oleh seorang calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penyelesaian penelitian ini pada dasarnya dikaji untuk memberi manfaat yang diharapkan, Adapun manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari kajian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan hukum bidang tata negara, khususnya dalam memajukan Pemilihan Umum di Indonesia. Dari paparan materi yang disampaikan semoga dapat menjadi solusi, pertimbangan dan rujukan dalam pembaharuan hukum tata negara kedepanya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis manfaat adanya karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, serta bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membaca guna menambah wawasan, pengetahuan serta informasi seputar hukum, Pemilu/Pilkada dan ilmu *fiqh siyāsah*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan akademis yang dijadikan sebagai pandangan dalam penelitian ini yang terdiri atas karya-karya Ilmiah. Adapun telaah pustaka dalam penelitian ini merujuk pada:

Pertama, Skripsi dari Silmi Susanti dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Politik Identitas di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abdu-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015).” Dalam kajian ini focus utamanya membahas persoalan politik identitas yang mempengaruhi kemenangan Ahyar-Mohan pada Pilkada Kota Mataram tahun 2015.¹¹ Dengan teori yang digunakan adalah konstruktivisme, primordialisme,

¹¹ Susanti Silmi, Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abdu-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015), Skripsi (Mataram: Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2020), 6.

dan instrumentalisme. Kesimpulan pada tulisan ini menegaskan bahwa pengaruh identitas etnik dan agama dalam politik sangat terlihat dari cara kampanye paslon Ahyar-Mohan, akan tetapi posisi agama dan etnik dinilai sangat nisbi, sebab secara analisis pertimbangan masyarakat lebih rasional.

Perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan penulis saat ini pertama terletak pada tempat objek yang dibahas, kedua teori yang digunakan, ketiga tentang segmentasi masalah politik identitas milik penulis ini tertuju pada peran organisasi keagamaan yang dijadikan alat untuk menggalang massa dalam Pilgub Jatim 2018. Adapun tinjauan teorinya berdasar perspektif *fiqh siyāṣah*, politik identitas, dan partisipasi politik sebagai dasar analisis penelitian.

Kedua, Skripsi dari Andy Prima Sahalatua dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judulnya “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022.”¹² Penelitian ini berfokus pada upaya politisasi identitas yang digunakan sebagai alat untuk meraih simpatikan publik yang didasarkan atas kesamaan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Fokus kajiannya berdasar pada ilmu politik dengan teori yang digunakan adalah politik identitas, multikulturalisme dan partisipasi politik. Pokok bahasan dalam skripsi ini tertuju pada politik identitas yang di dalamnya membahas tentang peranan para elite dalam mengakomodir identitas masuk kedalam proses politik, guna untuk meraih simpatikan warga dalam jumlah besar.

¹² Andy Prima Sahalatua “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Periode 2017-2022,” Skripsi (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , 2023), 10.

Perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan penulis saat ini pertama terletak pada tempat objek yang dibahas, kedua teori yang digunakan, ketiga tentang segmentasi masalah politik identitas milik penulis ini tertuju pada peran organisasi keagamaan yang dijadikan alat untuk menggalang massa dalam Pilgub Jatim 2018. Adapun tinjauan teorinya berdasar perspektif *fiqh siyāsah*, politik identitas, dan partisipasi politik sebagai dasar analisis penelitian.

Ketiga, Skripsi dari Achmad Junaedy Muchtar, dari UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.”¹³ Penelitian tersebut berfokus tentang strategi dan pengaruh politik identitas dalam Pilpres tahun 2019 di tinjau dari *fiqh siyāsah*. Kesimpulan pada penelitian tersebut pada dasarnya menjelaskan tinjauan dari *fiqh siyāsah* terhadap politik identitas yang terjadi dalam proses politik Pemilihan Presiden tahun 2019 tidak diperbolehkan menurut agama Islam. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa politik identitas secara aturan memang dilarang dengan berdasar pada UU. No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 9 tahun 1998 dan UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Perbedaan tulisan tersebut dengan tulisan penulis saat ini pertama terletak pada tempat objek yang dibahas, kedua teori yang digunakan, ketiga tentang segmentasi masalah politik identitas milik penulis ini tertuju pada peran organisasi keagamaan yang dijadikan alat untuk menggalang massa dalam

¹³ Junaedy Muchtar Achmad, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

Pilgub Jatim 2018. Adapun tinjauan teorinya berdasar perspektif *fiqh siyāsah*, politik identitas, dan partisipasi politik sebagai dasar analisis penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara penelitian yang objek dasarnya adalah hukum, baik sebagai suatu ilmu pengetahuan, atau aturan dogmatis serta hukum yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang tertanam dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada kajian ini ialah penelitian pustaka, dengan sifat penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum yang fokus utamanya meneliti bahan pustaka. Adapun cara kerja dalam penelitian pustaka ialah dengan mempelajari, meneliti, dan memberi kesimpulan terhadap dokumen hukum atau data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan yang ditemukan saat itu. Dalam arti luas penelitian ini tidak hanya mengkaji persoalan hukum saja, melainkan juga mencakup seluruh aspek yang bisa diakses melalui bahan pustaka.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif, yang cara kerjanya dengan menganalisis dan mendeskripsikan segala

¹⁴ Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2.

¹⁵ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 47.

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berhubungan dengan topik pembahasan secara menyeluruh dan sistematis. Dengan demikian, untuk menjawab asumsi-asumsi dasar yang diperoleh dari persoalan yang terkait, dalam prosesnya juga sangat mengutamakan kepastian hukum dan doktrin sebagai parameter utama penelitian.

Dalam penelitian normatif selain menggunakan pendekatan parundang-undangan, terdapat juga pendekatan konseptual. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam terhadap persoalan yang dibahas, dengan cara memadukan setiap dokumen hukum yang ditemukan, lalu disesuaikan dan dikaji menggunakan teori hukum yang dipakai. Misalnya *fiqh siyāsah*, politik identitas, partisipasi politik, dan beberapa doktrin hukum yang terkait.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif, atau kepustakaan, data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang sah atau jelasnya fokus mendalami bahan sekunder sebagai pokok penelitiannya. Adapun data ini diperoleh dari segala bentuk laporan dokumen hukum yang memiliki kualifikasi kuat sebagai standar data pada umumnya. Mengenai hal itu secara rinci dapat dimengerti penjelasan sebagai berikut:

a. Data Sekunder

¹⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Nusantra: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (2021): 6.

Data dalam konteks penelitian pustaka ini merujuk pada berbagai jenis literatur, berita online, karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan proses Pilgub Jatim tahun 2018. Selain itu penulis juga meninjau berbagai literatur buku *fiqh siyāsah* guna melengkapi tinjauan umum dari penelitian ini yang berhubungan dengan politik identitas, serta mencakup sudut pandang dan pemikiran yang disajikan oleh berbagai pakar hukum Islam terkait persoalan ini.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Data atau bahan primer dalam penelitian pustaka terdapat pada subjek penelitian yang diambil dari beberapa informasi aktual yang sejalan dengan topik pembahsan. Kutipan yang digunakan mencakup ayat-ayat Al-Quran dan dalil Hadis yang berkaitan dengan persoalan, serta berbagai bentuk keterangan gambar atau sejenisnya yang berupa pernyataan mengenai persoalan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder atau sumber hukum sekunder adalah bahan yang nantinya menghadirkan bimbingan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Sumber ini diperoleh dari bukti, catatan historis yang terpercaya seperti literatur penelitian seperti jurnal dan artikel, dokumen hukum, liertartur tentang studi *fiqh siyāsah* dan politik

¹⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

hukum Islam, surat kabar elektronik terpercaya, berita aktual yang berkaitan dengan Pilgub Jatim tahun 2018, serta bukti petunjuk yang sifatnya terpercaya dan akuntabel.

3. Teknik Dokumentasi

Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian pustaka ini yaitu teknik dokumentasi, lalu disusun dengan metode literer dengan cara memadukan seluruh data yang terkait. Adapun cara pengolahan data selanjutnya ialah:

- a. *Editing*, proses ini fokus pada pemeriksaan ulang atau evaluasi data yang ditemukan. Seperti halnya menelaah kebenaran informasi, kelengkapan, dan korelasi tentang keterlibatan organisasi keagamaan dalam proses pemenangan Khofifah Indar Parawansa.
- b. *Organizing*, tahap ini berisi tentang bagaimana caranya menyusun data atau bahan yang sudah di peroleh dengan kerangka yang sudah dibuat.
- c. Penemuan hasil, kelanjutan dari dua tahap di atas. Pada tahap ini setelah mendapatkan data maka, akan disusun menggunakan teori dan metode yang sudah ditentukan guna untuk mencari kesimpulan yang menyeluruh, sehingga dapat menjadi jawaban atas persoalan penelitian.

4. Analisis Data

Tahap ini menjelaskan mekanisme dalam mencari serta menyusun data yang bersumber dari data primer dan sekunder secara terstruktur, lalu menjabarkan ke dalam pola penelitian dan dianalisis dengan teori yang sudah ditentukan menggunakan metode kualitatif.

Analisis ini bersifat normatif dengan teknik analisis deskriptif, diawali dengan memadukan data serta informasi pokok dan selanjutnya melakukan interpretasi penalaran sesuai kajian teori yang dipakai untuk memberi makna terhadap tiap persoalan yang diangkat. Setiap paket kajian nantinya akan dihubungkan dengan satu dan yang lain, dengan mengidentifikasi fakta hukum, mencari norma kongkrit yang berkaitan fakta hukum, setelah itu mengkodifikasi setiap data yang diperoleh dan memberi jawaban.¹⁸

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ilmiah, pengujian data merupakan tahap yang sakral dan penting, sehingga penulis diharapkan teliti dalam menilai kredibilitas serta validitas dari data yang ditemukan. Secara umum keabsahan data dapat dilakukan dengan metode triangulasi, atau dengan interteksualitas secara sungguh-sungguh terhadap data penting yang diperoleh. Selanjutnya pada tahap analisis yang diolah dengan caranya reduksi data atau penyajian data valid menggunakan teori-teori yang dipakai, kemudian diolah dan dipadukan setiap komponen yang berakir pada menarik kesimpulan.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Bagian ini berisi tentang pengenalan persoalan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Secara umum bagian ini meliputi latar belakang,

¹⁸ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 131.

¹⁹ Dedi Susanto and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora 1, no. 1 (2023): 1.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, hingga metode penelitian dan sistematika penelitian kedepannya.

BAB II: Bagian ini berisi tentang kajian teori yang nantinya digunakan sebagai landasan dalam menginterpretasi dan menganalisis persoalan masalah. Adapun teori yang digunakan ialah dasar-dasar *fiqh siyāsah* contohnya seperti prinsip *siyāsah syar'iyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, *ummah* dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah, serta teori politik identitas dan partisipasi politik.

BAB III: Bagian ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis yang dapat ditemukan dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal artikel, surat kabar elektronik dan sejenisnya mengenai politik identitas Pemilihan Gubernur tahun 2018. Data tersebut nantinya akan diolah dan ditarik kesimpulan mendasar mengenai perspektif *fiqh siyāsah* terhadap politik identitas yang mengacu pada organisasi keagamaan.

BAB IV: Berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada tahap ini kesimpulan bukan hanya berisi tentang ringkasan dari seluruh proses pengkajian, namun pokok dari ringkasan ialah menjelaskan jawaban secara sederhana yang diperoleh dari bab analisis. Sedangkan saran merupakan kalimat yang berisi usulan atau rekomendasi kepada pihak yang berhubungan, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan harapan bagi semuanya.

BAB II

KONSEP POLITIK IDENTITAS MENURUT *FIQH SIYĀSAH*

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian

Fiqh secara terminologis atau istilah, menurut pendapat ulama-ulama syara' ialah pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber pada Al-Quran, Hadis, dan peninggalan kaum muslimin terdahulu, yang kemudian disusun oleh mujtahid dengan jalan rasional dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* mengandung arti tahu, paham, dan mengerti.¹

Sedangkan *fiqh* menurut bahasa (etimologinya) adalah mengetahui hal dengan pemahaman. Dengan kata lain *fiqh* ialah pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap perkataan dan perbuatan. Ibn Khaldun mengatakan bahwa pada masa awal Islam, orang-orang yang ahli di dalam agama akan mengembalikan pertanyaan kepada Al-Qur'an, untuk mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui ayat yang *mustasyābih* dan *muhkamah* serta mengetahui pengertian dan pemahaman yang mereka terima dari Rasulullah SAW.²

Selanjutnya kata *siyāsah*, secara bahasa memiliki makna membuat kebijaksanaan, memerintah, pengadilan, serta mengelola. Dikatakan *sāsa al qauma* yang berarti memerintah, memimpin, melatih dan mengatur sebuah kaum, makna *siyāsah* sendiri juga bisa berarti manajemen administrasi. Jadi pada kesimpulanya *siyāsah* secara bahasa mengandung beberapa makna, yaitu

¹ Syah Mabruur Dedi Syarial, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

² Ibid., 3.

mengurus, memerintah, memimpin, dan membuat kebijaksanaan dalam lingkup pemerintahan serta urusan politik. sedangkan *siyāsah* menurut istilah berarti memimpin atau mengatur sesuatu agar menuju kepada masalahat.³

Selanjutnya, apabila yang dimaksud dengan kata *siyāsah* itu adalah mengatur segenap umat, maka dalam hal ini agama Islam juga sangat memprioritaskan pentingnya mempelajari *siyāsah*. Islam sendiri juga tidak setuju dengan orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Jika kita melihat pengertian *siyāsah*, baik dari segi bahasa maupun terminologi, tentu secara dasarnya *siyāsah* (politik) adalah perbuatan yang mulia. Singkatnya *siyāsah* adalah usaha manusia untuk mengatur orang lain, maka dari itu menurut Ibn Qayyim *siyāsah* ialah keadilan Allah SWT, akan tetapi manusia menyebut dengan istilah *siyāsah* atau politik.

Konsepsi jika disederhanakan dalam satu kalimat, definisi *fiqh siyāsah* menurut agama Islam ialah sebuah ilmu yang berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dalam suatu negara, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat sesuai prinsip agama Islam. Dalam definisinya *fiqh siyāsah* terbagi dalam dua unsur kata, yaitu *fiqh* dan *siyāsah*, pembahasan terhadap bidang *fiqh siyāsah* menurut perkembangannya saat ini tentu tidak hanya membahas konsep negara Islam dan rakyat saja. Adapun bidang-bidang lain seperti hukum, ekonomi, hubungan internasional, administrasi pemerintahan, juga termasuk pembahasan pokok dalam kajian *fiqh siyāsah* saat ini.

³ Ibid., 6.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Membahas ruang lingkup *fiqh siyāsah*, pada tahap pengembangannya saat ini telah diketahui ada beberapa bidang/kategori *fiqh siyāsah*. Batasan *fiqh siyāsah* biasanya meliputi soal pengaturan pemerintahan, lembaga negara serta hubungannya, warga negara sekaligus hubungannya dengan warga negara yang lain, pengelolaan uang negara, hingga hubungan internasional. Contoh lingkup kajian *siyāsah* yang disampaikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy tergolong menjadi delapan kategori, yaitu:⁴

- a. *Siyāsah Dustūriyah Syar'iyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī'iyah Syar'iyah* (Penetapan Hukum)
- c. *Siyāsah Qaḍhā'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah* (Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah Idāriyah Syar'iyah* (Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Khārijīyah Syar'iyah/Siyāsah Dawliyah* (Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Pelaksanaan Undang-Undang)
- h. *Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'iyah*. (Politik Peperangan).

Di dalam banyaknya pembidangan/pemisahan antara satu materi pokok yang terkandung dalam *fiqh siyāsah* tersebut, pastinya ada nilai-nilai dasar dalam *fiqh siyāsah* yang sifatnya pokok. Nilai-nilai dasar inilah nantinya yang akan dijadikan oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis keabsahan masalah politik identitas yang terkandung dalam peran organisasi keagamaan. Adapun

⁴ A. Djazuli, *Fiqh siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003), 30.

nilai dasarnya seperti *siyāsah syar’iyyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, *ummah*, dan secara historis ada prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah.

Melihat negara Indonesia yang merupakan negara majemuk dan pluralistik bercita-cita ingin mewujudkan demokrasi politik yang efektif. Prinsip demokrasi dalam Pemilu/Pilkada dapat dimaknai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu tinjauan nilai dasar *fiqh siyāsah* di atas secara praktis dapat menjadi parameter dalam pembangunan demokrasi dan nilai-nilai politik di negara Indonesia, guna menentukan indikator masalah politik identitas basis organisasi keagamaan.

3. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Syar’iyyah*

Dalam pengertian umum *siyāsah syar’iyyah* merupakan hasil pemikiran dan penafsiran para ulama yang berhubungan dengan pengaturan (politik) kehidupan manusia.⁵ Menurut Yusuf Al-Qaradhawi *siyāsah syar’iyyah* ialah politik yang bersendikan pada kaidah-kaidah, aturan yang sesuai pada syara’. Misalnya mengatur hubungan pemimpin dengan rakyat, termasuk cara-cara pemimpin itu mendapatkan kekuasaannya. Sejalan dengan kehidupan bernegara batasan terhadap keabsahan pemeliharaan manusia di dalam negara itu secara dasar hukum *siyāsah syar’iyyah* mengacu pada pertimbangan Al-Quran, As-

⁵ Solehuddin Harahap, “SIYĀSAH SYARI’IYAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 4.

Sunnah, dan pendapat para Ulama. Adapun ciri-ciri yang dapat disimpulkan tentang *siyāsah syar'iyah* diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarah kepada kemaslahatan umat dan individu
- b. Beralaskan pada ideologi agama
- c. Memiliki dimensi akan tanggungjawab di akhirat
- d. Terdapat seni dan kreasi dalam pengaturan pemerintahan serta perundang-undangan walau tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis
- e. *Siyāsah* yang diharapkan tentunya bersumber dari syariat agama, bukan atas dasar kepentingan, kecurangan, dan kezaliman.⁶

Dalam sejarah agama Islam artikulasi terhadap nilai *siyāsah syar'iyah* juga pernah terjadi pada masa nabi Muhammad Saw. Berbagai macam peristiwa yang berkaitan dengan implementasi nilai *siyāsah syar'iyah* salah satunya ialah peristiwa *bay'at al-Āqabah*, atau perjanjian Rasulullah dengan penduduk Yastrib yang terdiri dari suku Aws dan Kharaj. Kemudian peristiwa lainnya seperti adanya perjanjian atau kontrak sosial antara komunitas muslim dan nonmuslim yang ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah sebagai dokumen formal sekaligus pedoman dalam kehidupan bernegara.⁷

Tujuan utama kekuasaan dalam *siyāsah syar'iyah* adalah untuk menjaga dan menjalankan pemerintahan serta ketertiban masyarakat secara luas yang

⁶ Miskari Miskari, "POLITIK HUKUM ISLAM DAN MAQASID AL-SYARIAH," *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (Agustus 20, 2019): 13.

⁷ Djazuli, *Fiqh siyāsah*, 13–14.

sejalan dengan tujuan syariah, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Oleh karena itu di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat 3 prinsip dasar dalam menjaga kestabilan politik Islam agar berjalan dengan baik. Adapun prinsipnya:

- a. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT
- b. Prinsip Keadilan
- c. Prinsip Persamaan
- d. Prinsip Musyawarah

Dengan merealisasikan hukum Islam sebagai pondasi dasar politik serta menjamin perlakuan adil tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia. Dengan adanya kepentingan politik yang beragam, prinsip persamaan dan musyawarah hadir bukanya untuk melenyapkan perbedaan dalam kepentingan politik, melainkan untuk merubah perbedaan tersebut sebagai energi guna mencapai tujuan bersama.

4. Demokrasi dalam Politik Islam

Selanjutnya nilai demokrasi dalam politik Islam. Demokrasi secara umum menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maka dari itu hakikat demokrasi sebenarnya menghendaki suatu sistem pemerintahan yang saling terikat oleh unsur-unsur (rakyat), di setiap proses calon pemimpin dalam meraih tujuannya melalui Pemilihan Umum yang demokratis.⁸

⁸ Lukman Santoso Az., Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, 1st ed. (Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016), 15–19.

Prinsip demokrasi mengemban persamaan hak kepada semua orang agar memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan identitas serta potensi dirinya dalam politik. Adanya prinsip demokrasi dalam Islam tentu dapat dijadikan sebagai pertimbangan, karena nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjelaskan faktor-faktor umum yang berkaitan dengan masalah politik dan hukum Islam. Adapaun prinsip-prinsip demokrasi politik dalam Islam diharapkan dapat menjadi pertimbangan moral terhadap beberapa gejala politik seperti:⁹

- a. Adanya berbagai pandangan atau pendapat yang berbeda
- b. Adanya berbagai kepentingan politik yang beragam
- c. Ukuran tingkat kecerdasan dan emosional yang berbeda
- d. Kondisi atau tempat yang berbeda
- e. Cara dan strategi yang berbeda dalam proses politik
- f. Perbedaan ideologis setiap orang
- g. Rivalitas atau keperpihakan antara institusi yang berbeda.

Pendapat tentang prinsip demokrasi dalam Islam juga disampaikan oleh Nurcholis Madjid yang objek gagasannya terfokus pada ruang lingkup negara Indonesia. Adapun pendapatnya ialah:

- a. Harus adanya kesadaran akan kemajemukan
- b. Kedawaasaan dan musyawarah

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyāsah* Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, 2nd ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 133.

- c. Kesesuaian dengan tujuan awal
- d. Nilai kejujuran dalam permusyawaratan
- e. Prioritaskan kebutuhan pokok masyarakat
- f. Adanya kerja sama dan saling percaya antara masyarakat
- g. Harus adanya pendidikan khusus terhadap demokrasi.

Hakikat demokrasi dalam politik Islam sebenarnya menjamin atas kebebasan individu dan menjamin persamaan hak dalam bidang kehidupan sosial. Keistimewaan sistem demokrasi dalam syariat Islam pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan prinsip politik yang bersendikan pada hukum syara' yang terdapat dalam *siyāṣah syar'īyyah*. Dengan adanya demokrasi dalam politik Islam diharapkan dapat menjaga kestabilan hak masyarakat dalam kehidupan politik dari banyaknya perbedaan identitas yang ada.

Dalam hal ini prinsip demokrasi di Indonesia selalu berkaitan dengan aspek cita-cita kolektif kemasyarakatan dan kenegaraan, sebagaimana yang sudah terjalin dalam kesepakatan luhur melalui ideologi bangsa yang timbul dari partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kuatnya nilai-nilai luhur seperti toleransi dan pluralisme menurut Nurcholish Madjid, dalam suatu interaksi sosial yang lebih luas, harus memiliki kesediaan menghormati perbedaan identitas pribadi atau kelompok lain, tanpa saling memaksakan kehendak dan pendapatnya sendiri.¹⁰

¹⁰ Ahmad Saebani, 165.

5. Toleransi Politik dalam Islam

Pengertian toleransi pada dasarnya berkaitan dengan masalah budaya dan nilai-nilai yang berkembang luas di masyarakat. Adanya sikap toleransi dapat menumbuhkan karakter masyarakat untuk saling menerima perbedaan budaya, adat, dan agama yang berbeda, serta menumbuhkan nilai persatuan diantara masyarakat. Sedangkan pengertian toleransi politik secara umum merupakan sikap moral akan bentuk kepatuhan terhadap norma hukum yang memadukan seluruh anasir-anasir yang berbeda dari beberapa nilai, norma, budaya, dan agama ke dalam sistem politik yang diatur oleh hukum.¹¹

Untuk menjaga nilai demokrasi Islam ini tetap kondusif dan stabil atas segala perbedaan, dalam nilai dasar *fiqh siyāṣah* juga mengenal adanya nilai toleransi politik dalam Islam. Pada dasarnya toleransi ialah sikap yang terbuka dalam menjamin kebebasan atas segala perbedaan di kalangan masyarakat. Adanya implikasi terhadap partisipasi politik dengan toleransi politik, dalam teori juga mengenal istilah toleransi politik komunal yang dikembangkan oleh Jeremy Menchik. Menurutnya di Indonesia konsep toleransi ini berkembang melalui interaksi pada organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, serta persatuan Islam. Konsep ini berkonsentrasi membangun sikap toleran melalui bimbingan kelompok agama dengan politik terhadap kelompok minoritas.¹²

¹¹ Sukron Romadhon and Try Subakti, "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 2.

¹² Muh Kasogi Nurdin, "Democratic Values Dan Toleransi Politik Pada Mahasiswa Beragama Islam Di Kota Makassar," *Islamic Insights Journal* 3, no. 2 (2021): 3–4.

Konsep toleransi politik dalam Islam juga sejalan dengan prinsip dasar Pancasila yang mengemban nilai toleransi, persatuan, keadilan, penghormatan kepada HAM, dan musyawarah. Hal ini tentu sejalan dengan beberapa prinsip toleransi dalam Islam, seperti:

- a. Prinsip kebebasan beragama
- b. Prinsip kemanusiaan
- c. Prinsip moderatisme

Dalam negara yang masyarakatnya sangat beragam, tentu untuk menghindari ancaman rusaknya nilai persatuan yang sudah dibangun sejak lama ini, solusi terbaik dalam mengatasi perihal ini ialah dengan memupuk nilai demokrasi dan toleransi yang kuat di antara berbagai komunitas dan identitas di masyarakat. Selain nilai demokrasi yang mengemban prinsip kebebasan dan persamaan politik, adanya toleransi yang kuat diharapkan dapat menjaga keseimbangan masyarakat dalam kehidupan politik.

Kontrak sosial yang berwujud musyawarah timbul akibat adanya partisipasi umum terkhusus pada wadah organisasi. Misal hadirnya wadah atau organisasi dapat mendasari rasa persamaan, solidaritas, serta semangat mewujudkan cita-cita bersama. Organisasi keagamaan seperti Muslimat NU sebagai salah satu wadah masyarakat dalam mengemban nilai-nilai agama Islam berbasis Ahlus sunnah wal jama'ah tentunya berpengaruh dalam mewujudkan tatanan demokrasi Islam yang berdasar dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman bersama-sama.

6. *Ummah* dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah

Dalam sejarah peradaban Islam, konsep persatuan masyarakat kala itu juga pernah berlangsung pada era Nabi Muhammad Saw. Istilah sekelompok orang pada saat itu dikenal dengan istilah *ummah* yang artinya sekelompok orang yang berbeda suku, ras, budaya dan adat yang ingin hidup bersama untuk mewujudkan kehendak Allah dan dipersatukan oleh kekuatan yang kuat serta global, khususnya Islam. *ummah* juga merupakan sumber kekuatan politik serta bentuk kedaulatan dalam Islam yang hanya dapat dicapai melalui perpaduan tiga unsur yaitu syariah, *ummah*, dan khalifah.¹³

Konsep *ummah* dalam Piagam Madinah kala itu dengan jelas menempatkan legitimasi masyarakat madani, seperti musyawarah, perumusan syarat dan arah tujuan hidup berdampingan yang mencakup kebebasan, keadilan dan partisipasi.¹⁴ Istilah *ummah* di dalam Piagam Madinah memiliki dua pengertian, pertama disebut sebagai kelompok yang dipersatukan oleh kaidah Islam. Kedua, kelompok atau organisasi umat yang menaungi jamaah serta komunitas yang bermacam-macam atas dasar ikatan politik.¹⁵

Di dalam Konstitusi Madinah istilah *ummah* digunakan khusus untuk masyarakat. Sejumlah contoh dalam Al-Quran setelah diteliti oleh para sarjana modern memiliki makna sebagai golongan etnis, bahasa, masyarakat yang di

¹³ Muhammad Faqih, "Konsep *Ummah* Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam," *Al'Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 4.

¹⁴ *Ibid.*, 9.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014), 208.

akui menganut suatu agama tertentu serta dibatasi oleh batasan agamanya. Istilah lain dalam bahasa arab *ummah* disebut juga sebagai suku, rakyat atau kelompok kekerabatan yang membentuk satu unit politik sosial yang praktis dengan anggota yang terlibat bermacam-macam.¹⁶

Dengan demikian relasi konsep *ummah* pada dasarnya sejalan dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Maka dari itu untuk menyempurnakan kajian teori dalam pembahasan politik identitas ini, kiranya penulis juga mencantumkan prinsip politik Rasulullah yang terkandung dalam Piagam Madinah. Adapun prinsipnya:¹⁷

- a. Prinsip Umat (Jamaah)
- b. Prinsip tentang Persatuan dan Persaudaraan
- c. Prinsip Persamaan (persesuaian umat)
- d. Prinsip Kebebasan (merdeka atau bebas dari perbudakan)
- e. Prinsip Tolong Menolong
- f. Prinsip tentang Perdamaian dan Musyawarah
- g. Prinsip Keadilan (keseimbangan hak dan kewajiban).

Relasi antara ketiga nilai-nilai dasar *fiqh siyāsah* di atas sesungguhnya sangat berkesinambungan dengan prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Adanya prinsip politik hukum Islam serta demokrasi atau kebebasan dalam kehidupan politik menandakan bahwa, kesadaran akan kemajemukan

¹⁶ Ahmad Saebani., 199.

¹⁷ Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 136.

tidak hanya terjadi di masa sekarang melainkan sudah ada sejak zaman hijrah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian sangatlah relevan apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, penulis jadikan sebagai parameter dalam menganalisis persoalan yang sedang dibahas.

Pendidikan moral yang terdapat pada politik hukum Islam, sejatinya menjunjung tinggi prinsip persaudaraan Islam dan persamaan hak dalam syariat Islam. Maka jika dihubungkan dalam mekanisme organisasi keagamaan dalam suatu kelompok masyarakat muslim, tentunya kecenderungan hak dan kewajiban setiap orang dalam organisasi tersebut dinilai terpadu. Sebab timbulnya solidaritas antar sesama anggota yang memiliki kepentingan umum dan khusus serta keharusan saling mendukung sesama kelompok guna meraih cita-cita bersama.

Di dalam materi yang sama Allah SWT juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71 yang maknanya: “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebgaimana mereka (adalah) penolong sebahagian yang lain.” Adapun ayat ini memberi petunjuk bahwa dalam Islam setiap individu muslim, laki-laki maupun perempuan, perorangan atau kelompok tentunya saling memiliki loyalitas dalam kemasyarakatan.

Faktor-faktor lain yang mendukung prinsip demokrasi ini dasarnya sudah tergambar oleh para pendiri negara Indonesia di masa lampau, dengan sistem pemerintahan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menggambarkan bahwa demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia

merupakan bagian dari politik identitas Islam.¹⁸ Prinsip dasar dalam organisasi keagamaan pasti berdasar pada semangat Islam yang harusnya berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah guna meraih kemaslahatan secara umum.

Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan jika melihat kaitanya dengan agama Islam, tentu dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an juga menerangkan betapa berharganya nilai persatuan dan kesatuan, sehingga Islam melarang adanya buruk sangka terhadap sesama manusia. Larangan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَّبُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Artinya, “Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena Sebagian kecurigaan dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”¹⁹

Dengan banyaknya keberagaman sosial, Islam juga menitahkan umatnya untuk bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Adapun perihal ini kaitanya dengan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁸ Nafik Muthohirin, “Politik Identitas Islam Dan Urgensi Pendidikan Multikultural,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019): 2.

¹⁹ “Surat Al-Hujurat Ayat 12 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed December 17, 2023, <https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

Artinya, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”²⁰

Kemudian menurut riwayat hadis, Rasulullah Saw, juga pernah memberikan pemahaman terkait politik identitas. Contohnya seperti cara-cara berpakaian (model pakaian), dan gaya rambut, yang menjadi nilai pembeda antara kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani. Riwayat hadis ini tertuang pada shahih al-Bukhari mengatakan sabda Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ

Artinya, “Dari Abu Hurairah ra. “Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut mereka, maka selisihilah mereka” (HR al-Bukhari).²¹

Perbedaan yang ditunjukkan diatas realitasnya hanya berlaku pada keadaan tertentu, misalnya saat perang. Adapun hadis lain yang menegaskan adanya perbedaan perilaku yang serupa juga di sampaikan oleh Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ
أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ
الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ

²⁰ “Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” 2023, <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

²¹ “Politik Identitas dalam Kacamata Islam,” NU Online, <https://nu.or.id/syariah/politik-identitas-dalam-kacamata-islam-WA24N>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2023).

Artinya, “Dari Ibn ‘Abbas ra, beliau berkata: Nabi Saw suka menyamai Ahli Kitab di Sebagian perkara yang tidak di perintahkan, Ahli Kitab suka mengurai rambut mereka, sedangkan orang-orang musyrik biasa membelah rambut mereka, maka beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, kemudian beliau membelahnya.”²²

Dari beberapa ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan masyarakat majemuk atau bermacam-macam, tentu salah satunya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menemukan jawaban yang sesuai tentang politik identitas. Berdasar pada prinsip keadilan dan toleransi, agama Islam sesungguhnya tidak melepaskan diri perihal masalah politik. Islam sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai dasar agar terwujudnya keadilan dan kemaslahatan umat dalam bidang politik.

Adanya prinsip toleransi, musyawarah dan kebebasan dalam Piagam Madinah tentu dapat dijadikan solusi dalam mengatasi peristiwa hukum dan politik yang terjadi saat ini, tak terkecuali dalam masyarakat yang majemuk. Sesuai dengan nilai-nilainya, Nabi Muhammad memiliki keinginan untuk membentuk badan politik atau masyarakat lokal melalui wadah yang berintegritas. Dengan demikian adanya kebebasan dalam menjalankan setiap agama yang dianut oleh berbagai kelompok yang berbeda, dapat menjadi bukti nyata bahwa relasi antara prinsip demokrasi ialah dengan toleransi.

Pada kesimpulan konsep dan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap politik identitas pada dasarnya sudah pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad Saw. Konsep ini sesungguhnya mengacu pada persamaan identitas sosial seperti

²² “Politik Identitas dalam Kacamata Islam.”

agama, etnis, suku, ras, dan sejenisnya guna membentuk kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara legal. Selain agama Islam juga menghendaki adanya perbedaan dan menjamin kebebasan dalam menaruh pilihan politiknya, di dalam Islam khususnya *fiqh siyāsah* juga menekankan nilai-nilai toleransi serta keadilan untuk menghormati segala perbedaan politik guna terhindar dari perpecahan sosial yang terjadi.

B. Politik Identitas di Indonesia

Untuk mengenal definisi politik identitas secara umum dasarnya perlu memisahkan antara pengertian tentang politik dan identitas. Sederhananya politik adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga pemerintahannya, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Max Weber (1919) memandang negara dari sudut pandang yuridis dan statis bahwa negara sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berhak untuk monopoli.²³

Kemudian kata identitas, menurut KBBI berarti ciri-ciri atau keadaan tertentu seseorang. Sedangkan secara umum identitas adalah bukti segala hal yang melekat pada seorang individu maupun kelompok tertentu yang dapat diakui dan menjadi bukti akan keberadaannya/legalitasnya. Identitas dalam arti formil biasanya mengacu pada dokumen-dokumen pribadi yang tertulis guna menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Sedang dalam arti materill

²³ Iskandar Zulkarnaen Muktasim, et. al., Buku Politik Praktik Siyāsah Syariah Aceh, Cetakan pertama (Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2021), 8.

identitas memiliki makna yang sangat subjektif mengacu pada kesadaran lingkungan sosial sebagai alat untuk mendapat pengakuan dan keterikatan.

Selanjutnya kalau berbicara tentang sejarah politik identitas, pada awalnya lahir pada tahun 1970-an di Amerika Serikat yang muncul sebagai sebuah simbol tuntutan perjuangan minoritas, gender, ras yang merasa terpinggirkan. Adanya pengakuan universal ini mendapatkan tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial seperti bangsa, agama, ras, etnis, gender yang ingin diakui sebagai superior. Penggunaan politik identitas secara umum seringkali ditafsirkan jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, misalnya pasca reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan simpati/pengaruh politik.²⁴

Istilah politik identitas menurut pengertian umum tidaklah sama dengan identitas politik. Sebab identitas politik cenderung merupakan identitas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok yang ingin menentukan posisinya dalam menjadi subjek dalam sebuah komunitas politik. Pendapat lain menurut Fitri Harahab dalam *conference paper*-nya yang berjudul “Politik identitas berbasis agama” menggolongkan identitas dalam dua kategori. Pertama identitas sosial yang mengacu pada agama, ras, kelas, etnis, gender dan

²⁴ I. Putu Sastra Wingarta et al., “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 2.

seksualitas. Kedua identitas politik yang mengacu pada nasionalitas dan kewarganegaraan atau *citizenship*.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Clarissa Rile Hayward yang berpendapat bahwasanya politik identitas adalah suatu aksi politik di mana seseorang berpartisipasi dalam gerakan yang sama berdasarkan pada masalah politik, pengalaman, dan tujuan yang sama demi kebaikan kelompoknya. Berikutnya pendapat politik identitas dari Lukmantoro, menurutnya prinsip politik identitas dasarnya mengedepankan kepentingan tertentu misal dari anggotanya atau kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik, identitas, baik itu mengacu pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama.²⁵

Pada saat yang sama, politik identitas adalah upaya penggunaan identitas untuk menciptakan pembedaan antara kita dan bukan kita yang sering kali didasarkan pada ras, etnis, budaya atau bahkan agama tertentu dalam proses politik.²⁶ Politik identitas mengacu pada mekanisme politik perorganisasian dengan menggunakan cara-cara politis serta menampilkan kehendak anggota suatu golongan tertentu karena persamaan sebuah identitas, ideologi maupun karakteristik yang mereka miliki.

Politik identitas yang saat ini berkembang pesat di seluruh dunia juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi yang sedang

²⁵ Haikal Fadhil Anam, Clarissa Rile Hayward didalam "Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia," Jurnal Pemikiran Politik Islam, *POLITEA* 2, no. 2 (2019): 3.

²⁶ Idzam Fautanu, M. Buhori, and Heri Gunawan, "Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," *Politicon* 2, no. 2 (2020): 2.

berjalan. Maka dari itu sudah tidak heran lagi apabila terdapat ungkapan bahwa semua politik adalah politik identitas. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh negara yang menganut demokrasi terbesar seperti halnya Amerika Serikat tetapi juga negara lainya seperti Inggris, Belanda, Prancis serta di negara Asia khususnya Indonesia.²⁷ Menurut Manuel Castells, penentuan politik identitas seharusnya masuk pada tahap bagaimana konstruksi identitas itu muncul. Adapun uraiannya yaitu:²⁸

1. *Legitimizing identity* yang artinya legitimasi identitas, makna dari jenis ini maksudnya identitas sebenarnya sudah dibangun oleh penguasa yang mendominasi kehidupan sosial. Dengan pengaruh dominasinya, penguasa tersebut memberikan seseorang atau golongan dengan identitas tertentu.
2. *Resistance identity* atau yang berarti resistensi identitas, definisi tentang jenis kedua ini ialah suatu identitas baru yang dibentuk karena sebuah tekanan dalam kondisi yang disebabkan adanya dominasi, sehingga munculah identitas baru yang berbeda dengan kebanyakan mayoritas yang lain. Dengan dasar dari sinilah yang kemudian Coulhoun memaknai sebagai politik identitas.
3. *Project identity* atau yang berarti proyek identitas, jelasnya proyek identitas ialah model yang digunakan oleh para aktor sosial dari golongan

²⁷ Machdani Afala, *Politik identitas di Indonesia*, Edisi revisi (Malang, Indonesia: UB Press, 2020), 2.

²⁸ Manuel Castells and Manuel Castells, *The Power of Identity*, 2. ed., with a new pref., [Nachdr.], *The Information Age: Economy, Society and Culture* / Manuel Castells, Vol. 2 (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010), 8.

tertentu yang bertujuan untuk membentuk identitas baru agar dapat sampai kepada posisi sentral di masyarakat.

Berdasarkan faktanya peristiwa politik identitas kenyataannya juga pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya saat timbulnya kasus penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menginterpretasi terjemahan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Sehingga menjadi sebab kala itu golongan umat Islam searah untuk memilih pemimpin yang seagama, hal ini juga menjadi faktor kuat terpilihnya Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Resiko yang dihadapi oleh masyarakat majemuk dengan hadirnya praktik politik identitas diprediksi dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa, oleh sebab itu harusnya selalu ada perhatian lebih terhadap persoalan yang satu ini.²⁹

Selanjutnya pada pembahasan politik identitas, terdapat suatu teori yang disebut *esensialisme*, teori ini mengkategorikan politik identitas ke dalam berbagai isu seperti halnya terkait persamaan jenis kelamin, ras, organisasi, agama, dan bentuk perserikatan manusia atau sejenisnya yang mengambil peran dalam proses politik secara nyata. Politik identitas juga pernah di singgung oleh ketua Gerkan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, menurutnya

²⁹ Ransis Raenputra, "Identitas dan Politik Identitas di Indonesia," dalam Universitas Airlangga Official Website <https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2023).

politik identitas mengancam keutuhan bangsa sebab, memunculkan gejala permusuhan dan saling menyerang mempersoalkan urusan agama.³⁰

Selanjutnya pada tahap klarifikasi secara konseptual tentang politik identitas, mungkin ada 3 faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai karakteristik politik identitas, diantaranya:³¹

1. Politik identitas biasa dimainkan oleh kelompok mayoritas. Konsep ini secara sederhana dianggap benar, akan tetapi dalam pengalaman politik di Indonesia, kerap juga kelompok minoritas malah sering memainkan dan menampilkan posisinya dalam kehidupan politik.
2. Tentang adanya politik kebangsaan yang selalu memanggul politik identitas. Politik ini kerap difahami sebagai tekanan bahwa kelompok minoritas harus menurut kepada mayoritas. Akan tetapi sebenarnya politik kebangsaan ini bertujuan untuk mengakomodasi kedua kelompok tersebut agar selalu inklusif serta damai.
3. Prinsip politik praktis dianggap sebagai politik identitas. Pemahaman ini memang secara dewasa dianggap sebagai sebuah fitrah. Karena subjek pemeran dalam politik ini adalah anggota masyarakat yang memiliki kesamaan geografis, agama, ras, etnis, adat, dan sejenisnya, sehingga adanya politik identitas dinilai sangat wajar jika berdasar pada prinsip ini.

³⁰ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme & Politik Identitas Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 225.

³¹ “Kesalahpahaman tentang Politik Identitas | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi,” <https://www.uinjkt.ac.id/id/kesalahpahaman-tentang-politik-identitas>, (diakses pada tanggal 15 Desember 2023).

Penjabaran tentang klarifikasi konseptual tersebut menegaskan bahwa faktor budaya politik daerah yang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pembentukan politik identitas dari sudut pandang konseptual. Oleh sebab itu budaya politik suatu daerah dengan seperangkat keyakinan, adat istiadat, dan struktur sosial yang terkait dengan kehidupan politik suatu masyarakat. Dalam hal ini budaya politik lokal dipengaruhi oleh susunan budaya, kepercayaan dan agama yang berkembang dalam masyarakat adat dan mempunyai nilai-nilai positif yang dikembangkan dan terpelihara dalam penyelenggaraan birokrasi lokal di daerah.³²

Konsekuensi matang pengaruh kehidupan sosial dalam daerah tertentu juga sangat mempengaruhi operasional bagaimana politik identitas itu dilakukan dengan mitra kelompok besar daerah. Khususnya dalam isu keagamaan politik identitas biasanya mengarah pada suatu perbedaan keyakinan dan pandangan. Isu tersebut sengaja diangkat untuk memunculkan solidaritas warga negara yang seiman guna membentuk konsolidasi sosial satu arah yang tertuju pada persamaan identitas agama.

Praktik politik identitas di Indonesia sebenarnya sudah lama terjadi. Hal ini terlihat dari terbentuknya organisasi daerah seperti Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes dalam melawan kolonialisme Belanda. Terlebih lagi, adopsi tema keagamaan pada Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta saat itu merupakan

³² Muhammad Sirajudin Fikri and Nico Oktario Adytyas, "Politik Identitas Dan Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)," *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 18, no. 2 (2018): 3.

puncak dari politik identitas berbasis agama di tanah air. Manfaat nyata dari politik identitas agama tentunya adalah politisi yang mempunyai persamaan agama maupun organisasi keagamaan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan keunggulan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.³³

Menguatnya politik identitas pasca runtuhnya rezim orde baru memunculkan banyak aktor politik guna mempertahankan sumber pendaan melalui jejaring patrimonial. Gerakan sosial yang muncul dari kelompok terpinggirkan akan membuat perhatian publik banyak tertuju olehnya, tidak hanya para ilmuwan sosial politik tetapi adanya fenomena politik identitas ini juga membangkitkan banyak kalangan pengkaji lainya di setiap penjuru Indonesia.³⁴

Munculnya politik identitas di Indonesia secara yuridis tidak lepas dari berlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi dasar bahwa dalam menentukan pemimpin di setiap daerah prinsipnya harus dipilih langsung oleh rakyat. Dengan adanya Pilkada maka, sebagian besar penduduk yang berada di daerah tertentu berpotensi akan memiliki kesempatan yang besar untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah di tempatnya. Hal ini juga selaras dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong munculnya gejala politik identitas.³⁵ Lalu

³³ Hubertus Herianto and Robertus Wijanarko, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 7.

³⁴ *Ibid.*, 4.

³⁵ Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 3.

setelah pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang desentralisasi, Gerakan politik identitas menjadi semakin jelas. Tidak heran bahkan banyak politisi lokal dan nasional secara terang-terangan menggunakan isu ini untuk melancarkan jalan menuju kekuasaannya.³⁶

C. Partisipasi Politik

Belajar pada situasi sebelumnya yang terjadi di DKI Jakarta, bahwa pengaruh kelompok mayoritas biasanya terhubung pada kontestasi sebuah wadah yang disebut sebagai organisasi. Hubungan pengaruh organisasi sebagai wadah partisipan politik bagi masyarakat dinilai dapat memberi ruang akses yang besar. Sebab karenanya organisasi bisa dijadikan suatu alat politik yang digunakan untuk menggalang massa yang jumlahnya besar di era zaman modern ini jelasnya.

Berbicara tentang partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo, secara definisi umum dapat diartikan sebagai bentuk usaha seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, termasuk Pemilihan Umum atau juga dapat memengaruhi kebijakan publik secara tidak langsung. Contohnya meliputi tindakan seperti pemberian suara dalam Pemilu, berpartisipasi dalam partai atau kelompok yang

³⁶ Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang and Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal," *Journal of Government and Politics*, 3 (2012), 2.

berkepentingan, hingga melakukan komunikasi terhadap pejabat parlemen atau pejabat pemerintahan dan sejenisnya.³⁷

Dalam Pilkada korelasi jabatan politik dengan cita-cita kelompok di dalamnya memiliki keterkaitan yang besar. Hal tersebut disampaikan Coleman tentang adanya interaksi antara aktor dan sumber daya, baik calon kepala daerah maupun masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dan dapat menentukan pilihannya. Ditambah usaha calon Kepala Daerah dalam menarik simpati masyarakat tentunya dapat mempengaruhi pilihan rakyatnya kedepan.³⁸ Faktor pemilih yang diidentifikasi melalui dasar sosiologis, psikologis, dan faktor pemilih rasional merupakan bagian pemahaman dari prinsip partisipasi politik. Berikutnya menurut Gabriel Almond, pengertian partisipasi dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu partisipasi politik konvensional dan non-konvensional.

Menurut pemahaman konvensional bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan ialah dengan pemberian suara, membuka forum diskusi kelompok, acara kampanye, termasuk kemudian melebur dengan berbagai kelompok yang berkepentingan. Dilain itu juga adanya komunikasi individu bersama pejabat politik, serta pengajuan petisi.³⁹ Sedangkan partisipasi non konvensional

³⁷ M. Sopyan Muslim, *Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak Gelombang Ke-3 Tahun 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), 8.

³⁸ *Ibid.*, 239.

³⁹ Sifa Nurfadilah, *Partisipasi Politik Civil Society Dalam Pilkada (Studi Kasus Rumah Dunia Dalam Pilkada Banten 2017)* Skripsi (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018), 18.

meliputi kegiatan pemilihan, *Lobby*/menghubungi pimpinan kelompok, kegiatan organisasi dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan, *Contacting*/membangun jaringan, tindakan kekerasan.⁴⁰

Adapun manfaat dari partisipasi politik bagi aktor politik ialah untuk menjadikan sebagai sarana komunikasi, penyampaian aspirasi dan penyesuaian sosial antara calon kepala daerah dengan masyarakat. Nilai khusus yang ditawarkan dapat menjadi acuan dalam memenuhi kebutuhan psikologis tertentu, agar mendapat dukungan dari masyarakat serta harapan dari masyarakat nantinya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya menjadi sosok pemimpin yang amanah dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan umat atau masyarakat.

Oleh karena itu tinjauan dari beberapa teori di atas mungkin dapat dijadikan parameter dalam meniali politik identitas yang kaitanya dengan organisasi keagamaan Muslimat NU, yang secara nyata digunakan dalam mendukung dan berperan aktif di setiap kampanye Khofifah. Meskipun di saat waktu yang bersamaan Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU.

⁴⁰ Ibid., 19.

BAB III

PERAN SERTA ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM PROSES PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH

A. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Melihat peta Provinsi Jawa Timur mungkin semuanya banyak yang tahu bahwa Provinsi ini terletak di Pulau Jawa, tepatnya di antara 111,00 hingga 114.40 Bujur Timur dan 7,120 sampai 8,480 Lintang Selatan. Wilayah Provinsi ini secara umum terbagi menjadi dua belahan besar yaitu Jawa Timur Daratan dan satunya Pulau Madura dengan luas keseluruhan mencapai 47.799,75 km². Kemudian di dalam daerah ini terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan jumlah penduduk sebesar 39.292.972 jiwa pada tahun 2017.¹

Lahirnya Provinsi Jawa Timur disamping legitimasi adanya sejarah juga diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 18 ayat 6, dilanjutkan Undang-Undang No. 2 tahun 1950, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950. Selanjutnya mengingat akan kelahiran Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai hari lahirnya Provinsi Jawa Timur.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 Jawa Timur *Province in Figures 2018* (Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur/BPS-Statistics of Jawa Timur *Province*, 2018), 3.

Secara keseluruhan corak budaya, adat, dan karakteristik masyarakatnya memiliki kebiasaan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Profil masyarakat Jawa Timur yang kaya akan budaya lokal serta komunitas yang beragam, menjadikan bahasa Jawa, dan kebiasaan tradisional sebagai identitas yang dimiliki. Selain itu daerah ini juga dikenal sebagai pusat industri dan keuangan di kawasan tengah dan timur Indonesia yang banyak berkontribusi terhadap produk domestik bruto nasional dari awal reformasi hingga sekarang.

Dimensi wilayah Jawa Timur dalam peta geografis Indonesia dinilai sangatlah strategis dan ideal di bidang Industri dan politik, sebab daerah ini dihipit oleh dua Provinsi besar seperti Jawa Tengah dan Bali. Sehingga menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan di Indonesia. Mayoritas penduduk asli Jawa Timur adalah Suku Jawa, walau demikian, entitas di Jawa Timur sekarang lebih beraneka ragam. Dalam hal keyakinan sebagian besar penduduk di Jawa Timur menganut agama Islam, lalu diikuti agama Hindu, Katolik, Kristen, Khonghucu, dan Buddha.

Selain daripada itu Jawa Timur juga merupakan rumah bagi pengrajin seni tradisional seperti keris, baju batik, dan berbagai perlengkapan adatnya. Lalu dalam hal kesenian, daerah ini juga memiliki beberapa kesenian yang terkenal di lingkungan dalam negeri, maupun luar negeri, seperti:

- a. Reog Ponorogo, kesenian ini berasal dari Kabupaten Ponorogo yang memiliki corak kombinasi antara tari, teater, dan musik tradisional.

- b. Ludruk, istilah ludruk di ambil dari bahasa Jawa yaitu lodrok yang berarti badut/lawak. Ludruk merupakan kesenian yang berbentuk drama yang sumbernya dari kehidupan masyarakat secara langsung.
- c. Karapan sapi, kesenian ini berasal dari Madura yang identik dengan perlombaan antar sepasang sapi dengan menarik sejenis kereta pacu.²

Banyaknya potensi khas Jawa Timur tak jarang banyak orang menyebut bahwa Jawa Timur adalah provinsi berbasis religius. Pendapat tersebut pernah disampaikan oleh Gubernur Jatim tahun 2017 yaitu Soekarwo atau biasa dipanggil Pakde Karwo yang mengatakan bahwa lima dari sembilan Walisongo makamnya berada di Jawa Timur. Ditambah lagi banyaknya pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai-kiai besar, menandakan adanya perpaduan kultur budaya ke-Timuran dengan budaya Jawa berimplikasi pada pembentukan karakter yang lebih kekeluargaan.³ Kentalnya nilai Islam di Jawa Timur terlihat juga dari data yang bersumber dari Kanwil Departemen Agama Jatim tahun 2018, yang mencatat sejumlah tempat ibadah umat Islam berupa Masjid dan Mushola dengan jumlahnya 37.686 unit serta 106. 647 unit.

2. Kondisi Sosial Politik Jawa Timur mendekati Pilgub Jatim 2018

Menyikapi perihal Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tentu tidak lepas dari siapa calon yang akan maju dan bagaimana

² Nadza Qurrotun A, "6 Budaya dan Tradisi Jawa Timur yang Dikagumi Dunia," detikjatim, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7000628/6-budaya-dan-tradisi-jawa-timur-yang-dikagumi-dunia>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2024).

³ "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim, Provinsi Berbasis Religius," accessed December 8, 2023, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/06/17/jatim-provinsi-berbasis-religius/>, (diakses pada tanggal 8 Desember 2023).

proses politik calon tersebut dalam menaruh perhatian dan kepercayaan kepada masyarakat. Pengaruh masyarakat dalam proses politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, oleh karena itu pentingnya untuk menyelidiki perihal kondisi sosial penduduk di wilayah tertentu serta mempelajari budaya yang berkembang di daerah tersebut.

Menitikberatkan pada pemaparan kondisi di wilayah Jawa Timur dengan banyaknya keberagaman budaya, kesenian dan penduduk yang heterogen dibandingkan dengan kondisi Jawa Barat dan Tengah, dinamika politik di Jawa Timur dinilai lebih dinamis dan *flexible*. Jawa Timur yang dianggap sebagai standar kriteria rangkaian politik nasional, dalam hal ini sempat memunculkan paradigma yang menyebut kunci awal dalam memenangkan kontestasi politik nasional harus dimulai dari memenangkan daerah Jawa Timur terlebih dahulu.

Walaupun demikian secara historis gambaran Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak boleh dilepaskan begitu saja, pasalnya fenomena yang menyita perhatian bangsa ini tentang pentingnya pembenaran identitas terhadap masuknya identitas dalam politik, tentu dapat memberi dampak kepada daerah-daerah yang lain untuk mengikuti gaya politik yang sama. Lahirnya kelompok keagamaan dan kebhinekaan memicu peluang baru terhadap munculnya politik identitas yang berimplikasi pada sistem demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Adanya prinsip demokrasi yang mengemban kesetaraan dan kebebasan di ruang publik dalam menentukan aktor pilihanya secara rasional, berbalik dengan politik identitas yang mengedepankan prinsip etnisitas, ikatan

primordial, suku, serta agama tertentu sebagai standar kualifikasi pemilih. Harus diakui bahwa gelombang politik identitas yang terjadi di Jakarta juga berdampak pada daerah lain, khususnya Jawa Timur tepatnya pada kontestasi Pilgub Jatim tahun 2018. Banyak wacana secara samar telah membuka jalan peluang dan fikiran baru terhadap gerakan para elite politik dan masyarakat yang ikut terlibat aktif dalam memberi dukungan politis terhadap pilihanya.

Menilai struktur masyarakat Jawa Timur yang mayoritas masih berbasis masyarakat pedesaan yang bersifat paguyuban, pilihan politik seringkali bergantung pada arahan pemimpin tradisional dan informal. Peran pemimpin seperti kiai, ustad atau ustadzah, kepala suku, desa, dan sejenisnya berpotensi besar melahirkan politik aliran dan identitas yang subur sebab terpelihara oleh keadaan kultur budaya sosial dalam masyarakat pedesaan.

Menurut keterangan dari buku klasik yang berjudul "*The Religion of Java*", menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Timur terbagi menjadi tiga golongan, yaitu santri, abangan, dan priyayi. Lebih jelasnya golongan santri lebih berafiliasi kepada partai-partai dengan karakter Islami yang berbasis di daerah tapal kuda, lalu golongan abangan dengan citra politiknya terhubung dengan partai-partai nasionalis serta berbasis daerah mataraman, terakhir golongan priyayi yang terlihat dekat dengan partai-partai modern saat ini.⁴

⁴ "Penguatan Demokrasi Lokal dan Politik Identitas: Meneropong Pilgub Jatim 2018," PETISI.CO, July 23, 2017, <https://petisi.co/penguatan-demokrasi-lokal-dan-politik-identitas-meneropong-pilgub-jatim-2018/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Melihat rivalitas dan perjalanan politik di Provinsi Jawa Timur tahun 2018, setidaknya sempat menghadirkan perhatian publik terkhusus media-media massa dan para pengamat untuk mengkaji setiap perjalanannya. Dua paslon Gubernur Jatim kala itu Khofifah dengan Wakilnya Emil Elistianto Dardak, berhadapan dengan Saifulloh Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakilnya Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti). Secara historis pertemuan Khofifah dengan Gus Ipul di panggung Pilkada dasarnya sudah pernah bertemu dan berkompetisi dalam ajang yang sama kala itu, yakni pada tahun 2008 dan 2013 yang saat itu Khofifah melaju sebagai calon Gubernur kalah untuk kedua kalinya.⁵

Dengan rekam jejak yang sama-sama lahir dari organisasi otonom Nahdlatul Ulama, pasti keduanya memiliki cirikhas dan karakteristik yang hampir sama dalam berkampanye. Misalnya, strategi Gus Ipul yang mendatangi Pasar Mbrangkal Mojokerto, Khofifah ke pasar Sidoarjo. Gus Ipul datang ke Pabrik Kapal Api, Khofifah ke Pabrik Rokok Kretek. Dengan ini dapat disadari lokasi-lokasi sentral dan strategis banyak dikunjungi oleh kedua kandidat tersebut di tambah dengan menghadiri berbagai acara keagamaan dan sosial di masyarakat dengan rutin.⁶

⁵ Tim CNN Indonesia, "Gus Ipul Vs Khofifah: Duel Klasik Poros NU di Pilgub Jatim," nasional, accessed December 10, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626194850-32-309211/gus-ipul-vs-khofifah-duel-klasik-poros-nu-di-pilgub-jatim>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

⁶ "Pertarungan Sengit Gus Ipul vs Khofifah di Jawa Timur," kumparan, accessed December 10, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/pertarungan-sengit-gus-ipul-vs-khofifah-di-jawa-timur>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Melihat jejak digital dalam kontestasi Pilgub Jatim tahun 2018 kemarin secara menyeluruh, nyatanya tidak lepas dari yang namanya pengaruh identitas agama dalam kampanyenya. Secara dominasi kedua calon Gubernur Khofifah dan Gus Ipul bukan hanya sekedar seorang warga NU biasa, namun merupakan tokoh besar dalam organisasi NU tersebut. Selain itu, kedua kandidat tersebut juga memiliki mesin politik yang setia dan teguh untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui jejaring organisasi. Misalnya Muslimat NU yang identik dengan Khofifah, dan GP Ansor yang identik bersama Gus Ipul.

Perlu disadari bahwa setiap calon yang maju saat itu merupakan kader dari organisasi NU yang tentunya berimplikasi pada dukungan para kiai di pesantren. Hal tersebut hingga memunculkan spekulasi adanya pembelahan poros kiai dan pondok NU terkait dukungan terhadap Cagub-Cawagub yang berkontestasi. Adanya persamaan ideologi berakibat pada munculnya dua poros yang terbentuk. Poros pertama, dukungan dari pondok Tebuireng Jombang yang dipimpin oleh KH. Salahuddin Wahid, diikuti dengan KH. Asep Syaifuddin Halim, Pimpinan Pondok Amanatul Ummat Mojokerto, poros ini mengarahkan dukungannya kepada Khofifah-Emil. Poros kedua yaitu poros yang terhubung dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang diikuti oleh dukungan pimpinanya KH, Anwar Manshur dan KH. Anwar Iskandar, pengasuh Ponpes Al-Amin Jamsaren yang mengarahkan dukungannya terhadap Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.⁷

⁷ Ainur Rohim and Mayuko Galuh Mahardika, "Pembelahan Politik Kiai NU Di Pilgub Jatim 2018," *Jurnal Transformative* 4, no. 2 (2018): 3–4.

Gejolak politik yang terjadi antara Khofifah dengan Saifullah Yusuf juga tidak selesai dengan cepat, misalnya dalam bentuk dukungan lain seperti fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil sebagai Gubernur, oleh para ulama pendukung paslon satu di Ponpes Amantul Ummah Mojokerto tanggal 3 Juni 2018. Fatwa ini kemudian dijelaskan oleh Roziqi yang menurutnya hanya sebagai bentuk antisipasi dari dukungan pengasuh Ponpes Sidogiri Pasuruan KH. Nawawi Abdul Djalil kepada Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.⁸

Kuatnya elektabilitas Gus Ipul yang berdasar adanya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang merupakan basis nahdliyin terbesar di Jawa Timur sejatinya memberi kesan lebih dibanding lainnya. Lalu melihat keunggulan dari Khofifah yang seorang Menteri Sosial dan Ketua Umum Muslimat NU juga tidak lepas daripada dukungan para kiai. Muslimat yang memiliki pengaruh besar terhadap jumlah massa yang mendukungnya, di tambah restu dari Presiden Jokowi, Khofifah maju pada Pilgub Jatim tahun 2018 seakan menambah elektabilitas Khofifah naik begitu pesat.⁹

Melihat dinamika politik yang terjadi di Jawa Timur kala itu, secara nyata menyadarkan bahwa pengaruh segmentasi agama dan dukungan para pemimpin informal sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi paslon yang akan bertanding. Pendapat ini juga diperkuat oleh

⁸ Kukuh S. Wibowo Syailendra Persada, "Fatwa Fardu Ain Dilaporkan Polisi, Ini Reaksi Tim Khofifah-Emil - Pilkada Tempo.Co," accessed December 10, 2023, <https://pilkada.tempo.co/read/1099562/fatwa-fardu-ain-dilaporkan-polisi-ini-reaksi-tim-khofifah-emil>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

⁹ Ronggo Astungkoro, "Pertarungan antara Khofifah-Gus Ipul akan Berlangsung Seru," *Republika Online*, October 20, 2017, <https://republika.co.id/share/oy2nsp330>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Buku dari Asep Saeful Muhtadi yang berjudul “*Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif.*” Di dalam karya tersebut menjelaskan bahwa sejak kelahirannya NU dan organisasi keagamaan lainya secara informal memang tidak melepaskan diri dari kehidupan politik.

Fakta-fakta jejaring politik identitas dalam pemenangan Khofifah-Emil secara tekstualis juga banyak diberitakan oleh media informasi. Misalnya pada sumber informasi dari Kompas menyebutkan salah satu faktor penting dalam kemenangan Khofifah dalam Pilgub Jatim 2018 ialah disebabkan adanya basis massa yang kuat dari Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Selain itu faktor gender juga menjadi keunggulan Khofifah karena basis perempuan yang berlatar belakang Muslimat NU cenderung lebih diuntungkan.¹⁰

Dalam Pilgub Jatim 2018 dapat diketahui bahwa nuansa identik NU begitu kelihatan, walaupun hal ini juga tidak menimbulkan kontroversi atau ketersinggungan di kalangan luar NU. Dalam hal ini tindakan profesionalitas dari setiap Cagub-Cawagub mampu memberi wajah baru dan mampu saling merangkul dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis. Corak nuansa NU yang tidak bisa dipisahkan dari setiap paslon berujung adanya keinginan mendapat legitimasi dari kiai-kiai, Pondok Pesantren dan santri. Sebab itu misi

¹⁰ Sakina Rakhma Diah Setiawan Sabrina Asril, “Tumbang Gus Ipul-Puti Di Jatim, Ini Rahasia Kekuatan Khofifah-Emil,” accessed December 10, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/07060761/tumbang-gus-ipul-puti-di-jatim-ini-rahasia-kekuatan-khofifah-emil>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Khofifah dan Gus Ipul saat kampanye nanti adalah memperjuangkan hati dan pikiran warga NU dengan gaya komunikasi politik masing-masing.

Keterlibatan golongan kiai dan santri terhadap proses kehidupan politik, seolah-olah memandang harapan besar terhadap para kandidat yang maju ingin dengan keterwakilanya sebagai Gubernur Jawa Timur. Walaupun demikian, kiai dan santri berharap agar proses politik yang berlangsung tetap mengikuti standar *siyāsah* Islam yang mana sejalan dengan adanya pendidikan politik yang baik agar di masa depan tidak terjebak dalam liberalisasi politik demokrasi. Sangat disayangkan apabila karena kurangnya pemahaman politik praktis yang menyeluruh kepada umat Islam, membuat energi yang digunakan untuk *izzul Islām wal muslimīn* jadi terabaikan.¹¹

3. Pilkada Jawa Tmur Tahun 2018

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu bentuk nyata bahwa keberadaan demokrasi di negara Indonesia tetap terjaga. Dalam sistem demokrasi tertuang prinsip pembatasan kekuasaan yang itu dilakukan pada setiap negara yang menganut sistem ini dengan mengadakan Pemilihan Umum atau sejenisnya dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Tujuan daripada pembatasan kekuasaan tentunya untuk mencegah penguasa agar tidak melakukan dominasi terhadap sistem pemerintahan kedepannya, sekaligus bertujuan menyelamatkan kedaulatan rakyat secara penuh.

¹¹ Tim NN, "Politik Identitas NU di Pilgub Jatim Nusantaranews," *Nusantaranews* (blog), accessed December 10, 2023, <https://nusantaranews.co/politik-identitas-nu-di-pilgub-jatim/>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Berbicara tentang Pemilihan Kepala Daerah, pastinya tindakan ini memiliki dasar hukum sebagai sumber wewenang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pilkada. Adapun dasar hukum yang mengatur jalannya Pilkada saat ini jatuh kepada UU. No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. No. 1 Tahun 2015, pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selain itu aturan yang mengatur pencalonan pada partai politik atau koalisi parpol pada Pemilihan Gubernur 2018, telah dituangkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Serta berdasar Surat Keputusan Jawa Timur Nomor: 8/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017, dan PKPU No. 8 Tahun 2018. Adapun rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jatim 2018 secara matang sudah tersusun menurut jadwal pelaksanaannya, adapun keterangannya:

Tabel 3. 1

Jadwal pelaksanaan Pilkada Jatim 2018

Tanggal	Tahapan	Tanggal	Tahapan
27 September 2017	Perencanaan Program dan Anggaran	30 Desember 2017 hingga 27 Juni 2018	Pemuthakiran Data dan Daftar Pemilih
27 September 2017	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	31 Juli 2017 hingga 3 Januari 2018	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
31 Mei 2018	Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	8 Januari 2018 hingga 10 Januari 2018	Pendaftaran Pasangan Calon

Lanjutan Tabel 3.1

14 Juni 2017 hingga 23 Juni 2018	Sosialisasi kepada Masyarakat	15 Februari 2018 hingga 23 Juli 2018	Massa Kampanye
14 Juni hingga 26 Juni 2018	Penyuluhan atau Bimbingan Teknis kpd KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU/KPI Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS	14 Februari 2018 hingga 13 Juli 2018	Laporan Audit serta Dana Kampanye
12 Oktober 2017 - 3 Juni 2018	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	17 Maret 2018 hingga 26 Juni 2018	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan serta Perhitungan Suara
12 Oktober 2017 - 11 Juni 2018	Pemantauan Pemilihan	27 Juni 2018	Pemungutan serta Perhitungan Suara di TPS
24 November 2017 - 30 Desember 2017	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	27 Juni 2018 - 9 Juli 2018	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sumber data: KPU Provinsi Jawa Timur¹²

Sesuai dengan jadwal pelaksanaannya, pada tanggal 18-20 Januari KPUD Provinsi Jawa Timur membuka pendaftaran bakal calon Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dari setiap

¹² “KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2018,” accessed December 10, 2023, <https://datapemilu.kpu.go.id/pilkada2018>, (diakses pada tanggal 10 Desember 2023).

Kabupaten/Kota di Jawa Timur sekitar 30.155.719 orang. Dengan presentase laki-laki 14.840.353, dan perempuan 15.315.366, dan tempat pemungutan suara yang tersebar berjumlah 67.644 di 666 kecamatan dan 8.497 di desa/kelurahan. Selanjutnya pada gelaran Pilgub kali ini, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar sebagai kandidat utama sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Adapun calonnya yaitu:

- a. Pasangan nomor urut satu ditempati oleh Khofifah Indar Parawansa dan Wakilnya Emil Elistianto Dardak yang di usung oleh Partai Demokrat, PPP, Nasdem, Golkar, Pan, dan Hanura Jatim. Khofifah sebelum mencalonkan diri menjadi Gubernur dalam pengalaman politiknya di tingkat nasional, dia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI di bawah Presiden Jokowi. Sedangkan Emil Dardak, sebelum mencalonkan sebagai Wakil Gubernur dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Trenggalek dan sempat jadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur.
- b. Pasangan nomor dua di tempati oleh Saifullah Yusuf dan Wakilnya Puti Guntur Soekarno dengan partai yang mengusung partai PKB, PKS, Gerindra, PDI-P. Sebelum mencalonkan sebagai Gubernur, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul panggilan akrabnya juga pernah melalui perjalanan politik yang cukup panjang, misal menjadi Wakil Gubernur Jatim selama dua periode, dan menjadi Mendes PDPT era Presiden SBY. Sedangkan Wakilnya Puti Guntur Soekarno atau biasa dipanggil Mbak Puti dalam kiprah politiknya dia juga pernah menjadi anggota DPR-RI.

Melihat persaingan politik di Pilgub Jatim tahun 2018 setidaknya banyak melahirkan pelajaran dan pembelajaran baru bagi setiap politisi, maupun para pengamat dan masyarakat. Fenomena politik yang terjadi antara dua paslon tersebut mellihatkan bahwa faktor budaya keagamaan dalam menekan elektabilitas dan jumlah pendukung masing-masing calon memang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pasalnya bukan tidak bisa, namun kedua paslon yang berlatar belakang dari satu organisasi keagamaan yang sama yaitu Nahdlatul Ulama (NU) memberi citra politik yang berbeda dengan sebelumnya.

Persaingan ketat antara kedua paslon tersebut dimulai secara formal sejak masa kampanye diumumkan, namun kendati demikian usaha setiap paslon dan tim suksesnya dalam meraih dukungan masyarakat Jawa Timur kala itu sesungguhnya sudah dilakukan sebelum masa kampanye dibuka. Gerakan yang dilakukan bermacam-macam dan tidak hanya menggunakan media massa atau sosial, para kandidat juga memiliki pendukung yang loyal di setiap daerah karena persamaan identitas sebelumnya. contohnya misal pasangan calon nomor urut satu Khofifah-Emil yang identik dengan Muslimat NU sebagai salah satu startegi penghubung suara. Sedang paslon nomor dua dengan GP-Ansor yang juga loyal dalam memberikan bantuan serta dukungan kepada Saifullah-Puti di Pilgub Jatim tahun 2018.

Hal semacam ini tentunya apabila didalami secara empiris dan akademis maka, istilah yang biasa digunakan dalam politik praktis terhadap gerakan massa yang memakai simbol atau identitas dalam politik disebut sebagai politik identitas. Walaupun coraknya berbeda dengan pengertian politik identitas pada

daerah yang lain, uniknya pada gelaran Pilgub kali ini identitas yang sebenarnya termasuk dalam satu organisasi keagamaan yang sama yaitu NU. Adanya persamaan ideologi dan latar belakang dari kedua paslon tersebut dinilai memberikan corak tersendiri saat berpolitik dan berkampanye.

Penggunaan identitas ini sebelumnya tidak hanya terbangun saat proses kampanye Pemilihan Gubernur resmi dibuka, namun kaitanya secara latar belakang setiap kandidat adalah masing-masing merupakan kader dari NU sendiri. Khofifah yang menjadi Ketua Muslimat NU sejak tahun 2000 yang identik dengan kelompok tersebut tentu sudah sewajarnya kalo Muslimat solid dalam mendukung Khofifah. Dilain itu awal kiprah Gus Ipul di politik juga tidak lepas sama yang namanya organisasi GP Ansor. Gus Ipul pernah menjabat sebagai Ketum GP Ansor tahun 1999, dengan menggantikan Iqbal Assegaf yang wafat kala itu. Kemudian di tahun 2005 sampai 2010 Gus Ipul juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor yang saat itu bersamaan dengan dirinya dicopot dari jabatan sejen PKB digantikan oleh Lukman Edy.

Selanjutnya, dari rangkaian proses yang sudah dilalui serta fenomena politik yang terjadi saat itu. Pada akhirnya gelaran Pemilihan Gubernur kali ini menurut data akhir dari KPUD Provinsi Jawa Timur secara sah kontestasi ini dimenangkan oleh paslon nomor satu yaitu Khofifah-Emil yang memperoleh suara sebanyak 10.465.218 dengan presentase 53,55%. Sedang perolehan pasangan nomor urut dua yaitu Gus Ipul-Mbak Puti memperoleh total 9.076.014 suara dengan presentasi mencapai 46,45%, dari total suara keseluruhan berjumlah 19.541.232.

Dengan demikian Pilkada yang dilaksanakan secara demokratis ini pada akhirnya membawa pasangan nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa dengan Wakilnya Emil Elistianto Dardak, berhak untuk menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur tahun periode 2019-2024. Setelah itu Khofifah-Emil nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo berdasar pada Keppres nomor 2/P Tahun 2019 pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 di Istana Negara.

4. Peran Muslimat NU dalam Pemenangan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Dari segmentasi kondisi sosial politik yang terjadi, dapat dimengerti bahwa persoalan politik identitas yang mengerucut pada organisasi keagamaan dapat dilihat dari beberapa data yang diperoleh penulis, Data tersebut bersumber dari literatur seperti Jurnal, surat kabar daring dan sejenisnya yang terkait. Adapun datanya yaitu:

Tabel 3. 2

Keterlibatan Muslimat NU dalam Pemenangan Khofifah-Emil

No.	Nama Data	Sumber Data
1	Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018	Jurnal Artikel dari Silkania Swarizona dan Riady Raffiudin ¹³
2	Kinerja Muslimat NU dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018	Jurnal Artikel dari Fatikh Fauzal Adhim ¹⁴

¹³ Silkania Swarizona and Riady Raffiudin., 1–9.

¹⁴ Fatikh Fauzal Adhim., 1-16.

Lanjutan Tabel 3.2

3	Mobilisasi Politik Muslimat Jawa Timur dalam Memenangkan Khofifah-Emil di Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	Jurnal Artikel dari Chaniin Umamah ¹⁵
4	Partisipasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018	Skripsi dari Achmad Wahyu Ilhami ¹⁶
5	Peran Media Sosial dalam Membentuk Pemasaran Politik Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) Berimpact pada Elektabilitas Individual maupun Organisasi	Jurnal Artikel dari Ayu Surita Jannah ¹⁷
6	Strategi Komunikasi Politik Khofifah-Emil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018	Jurnal Artikel dari Rafaela Benigna ¹⁸
7	Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim	Berita Jawapos.com ¹⁹
8	Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: Peran Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Pemenangan Khofifah Indar Parawansa	Tugas Akhir dari Universitas Indoneisa Library ²⁰

¹⁵ Chaniin Umamah, "Mobilisasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: Studi Muslimat Jawa Timur Dalam Memenangkan Pencalonan Khofifah-Emil" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/91799/>.

¹⁶ Achmad Wahyu Ilhami, "Partisipasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018" (PhD Thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University, 2019), <https://erepository.uwks.ac.id/3351/1/File%20Upload%20Perpus%20Univ..pdf>.

¹⁷ Ayu Surita Jannah, "Peran Media Sosial Dalam Membentuk Pemasaran Politik Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) Berimpact Pada Elektabilitas Individual Maupun Organisasi," Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

¹⁸ Rafaela Benigna, "Strategi Komunikasi Politik Khofifah-Emil Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/87300/>.

¹⁹ Sofyan Cahyono, "Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim - Jawa Pos," Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim - Jawa Pos, July 16, 2018, <https://www.jawapos.com/pemilihan/0168480/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-jatim>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

²⁰ Rendra Saputra Reni Chandriachsja, "Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: Peran Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemenangan Khofifah Indar Parawansa = Election for Governor of East Java 2018: The Role of Muslimat Nahdlatul Ulama in the Winning of Khofifah Indar

Lanjutan Tabel 3.2

9	Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa)	Jurnal ArtMaulina Pia Wulandari Maharani Novia Zahro.) ²¹
10	Khofifah Tegaskan Maju Pilgub Jatim 2018 di Depan Muslimat NU	Berita Online dari CNN Indonesia ²²
11	Kata Muslimat NU, Mendukung Khofifah-Emil itu Untuk Dunia-Akhirat	Berita Online dari Tempo ²³
12	Ulama dan Muslimat NU Solid Dukung Khofifah	Berita daring dari Okezone.news ²⁴
13	Manuver Garang Muslimat NU di Timur Jawa	Berita Online dari KumparanNews ²⁵
14	Khofifah Minta Dukungan Muslimat NU untuk Jadi Gubernur	Berita Online dari Republika.co.id ²⁶

Parawansa.,” Universitas Indonesia Library (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021), <https://lib.ui.ac.id>. (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

²¹ Maulina Pia Wulandari, Maharina Novia Zahro, “Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa),” *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2022): 26–49.

²² Tim CNN Indonesia, “Khofifah Tegaskan Maju Pilgub Jatim 2018 di Depan Muslimat NU,” *nasional*, accessed December 12, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171104202130-32-253510/khofifah-tegaskan-maju-pilgub-jatim-2018-di-depan-muslimat-nu>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

²³ Juli Hantoro, “Kata Muslimat NU, Mendukung Khofifah-Emil Itu Untuk Dunia-Akhirat,” *Tempo*, April 9, 2018, <https://pilkada.tempo.co/read/1077852/kata-muslimat-nu-mendukung-khofifah-emil-itu-untuk-dunia-akhirat>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

²⁴ Syaiful Islam Okezone, “Ulama dan Muslimat NU Solid Dukung Khofifah : Okezone News,” March 22, 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/03/21/519/1876202/ulama-dan-muslimat-nu-solid-dukung-khofifah>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

²⁵ Anggi Kusumadewi Ulfa Rahayu, “Manuver Garang Muslimat NU di Timur Jawa,” *kumparan*, accessed December 12, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

²⁶ Dadang Kurnia Bilal Ramadhan, “Khofifah Minta Dukungan Muslimat NU Untuk Jadi Gubernur | Republika Online,” accessed December 12, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/p1i7sy330/khofifah-minta-dukungan-muslimat-nu-untuk-jadi-gubernur>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2023).

Lanjutan Tabel 3.2

15	Muslimat NU Jatim Solid Dukung Khofifah Indar Parawansa	Berita Jawapos.com ²⁷
16	Relawan Muslimat Surabaya Siap Menangkan Khofifah-Emil	Berita Online dari suarasurabaya.net. ²⁸
17	Khofifah Klaim Dukungan Muslimat NU Solid	Berita HarianJogja ²⁹
18	Solid Mendukung, Muslimat Mojokerto Sebut Khofifah Mampu Menata Umat	Berita Daring dari TribunJatim.com ³⁰
19	Muslimat dan Fatayat di Jombang Serukan Dukungan Untuk Khofifah-Emil	Berita Daring dari Surya.co.id ³¹

Selanjutnya tentang rangkaian kinerja dan startegi Muslimat NU dalam mempengaruhi kemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018, menurut sumber data di atas, kiranya penulis merangkum pokok-pokok kegiatan Muslimat yang berhubungan dengan proses kampanye terhadap pasangan nomor urut satu tersebut.

Diantaranya yaitu:

²⁷ Soejatmiko, "Muslimat NU Jatim Solid Dukung Khofifah Indar Parawansa - Jawa Pos," Muslimat NU Jatim Solid Dukung Khofifah Indar Parawansa - Jawa Pos, January 1, 2018, <https://www.jawapos.com/metropolis/017106/muslimat-nu-jatim-solid-dukung-khofifah-indar-parawansa>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

²⁸ Abidin Zumrotul, "Relawan Muslimat Surabaya Siap Menangkan Khofifah-Emil," March 22, 2018, <https://www.suarasurabaya.net/road-to-grahadi/2018/Relawan-Muslimat-Surabaya-Siap-Menangkan-Khofifah-Emil/>, (diakses pada tanggal 25 Februari 2024).

²⁹ Abdul Jalil Media, "Khofifah Klaim Dukungan Muslimat NU Solid," Harianjogja.com, accessed February 27, 2024, <https://news.harianjogja.com/read/2018/05/07/500/914779/khofifah-klaim-dukungan-muslimat-nu-solid>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

³⁰ Fatimatuz Zahroh, "Solid Mendukung, Muslimat Mojokerto Sebut Khofifah Mampu Menata Umat," Tribunjatim.com, 2024, <https://jatim.tribunnews.com/2018/04/07/solid-mendukung-muslimat-mojokerto-sebut-khofifah-mampu-menata-umat>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

³¹ Fatimatuz Zahroh, "Muslimat dan Fatayat di Jombang Serukan Dukungan untuk Khofifah-Emil," Surya.co.id, 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/03/29/muslimat-dan-fatayat-di-jombang-serukan-dukungan-untuk-khofifah-emil>, (diakses pada tanggal 27 Februari 2024).

- a. Strategi memperkuat ketokohan Nahdliyin dalam diri Khofifah guna mendapat dukungan dan simpati dari warga NU. Besar kemungkinan suara NU dalam Pilgub Jatim 2018 sangatlah besar karena mayoritas masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar merupakan warga Nahdliyin.
- b. Merangkul ketua Muslimat NU Jatim, atau istilahnya “pegang kepala, ekor pun ikut”, atau dengan cara menggandeng ketuanya pasti barisan struktural dan anggotanya pun mengikuti.
- c. Strategi memasukan program-program kesejahteraan kelompok perempuan dalam janji kampanyenya, misalnya program berbentuk modal usaha bagi kelompok perempuan.
- d. Strategi penggunaan busana untuk memperkuat citra dan branding dengan pakaian yang idenitk dengan pakaian putih yang jilbabnya bebentuk segi empat yang juga berwarna putih, kemudian munculah slogan “*coblos seng jilbab puteh*”
- e. Menaikan suara dengan Jokowi *effect* untuk memperkuat citra dan elektabilitas dengan imagenya yang berbunyi “Khofifah orangnya Jokowi”, hal tersebut dilakukan untuk mebangun kedekatan Jokowi dengan Khofifah yang dapat meningkatkan efek popularitas serta daya tarik masyarakat Jatim untuk Khofifah.
- f. Strategi dalam menghadapi isu negatif dengan jorgan “*Wes Wayahe*” oleh anggota Muslimat. Antisipasi ini dilakukan guna mencegah terjadinya isu politik gender yang tertuju pada pemimpin perempuan.

- g. Menaikan elektabilitas dan reputasi Emil Dardak dengan melibatkan Arumi Bachsin dalam setiap proses kampanye. Nama Arumi Bachsin yang selalu memakai pakaian khas Muslimat diharapkan dapat menjadi modal sosial yang efektif dalam meningkatkan reputasi dan elektabilitas Emil Dardak.
- h. Strategi dari kader Muslimat NU yang merupakan kalangan dari kaum ibu sekaligus menjadi agen untuk kampanye *door-to-door* guna menjangkau demografi milenial dan segmen keluarga.
- i. Mobilisasi politik melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, arisan, yasinan, dengan cara menyampaikan informasi, gagasan, serta program kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh Khofifah.
- j. Strategi menarik suara kelompok non-Muslimat NU melalui kampanye Pemilu dan partisipasi dalam kegiatan seperti kelompok Aisyah Muhammadiyah dan perempuan non-Muslimat.
- k. Siasat untuk mengontrol massa Muslimat NU di pusat sampai ke anak cabang guna memunculkan solidaritas bersama dengan merawat jaringan politik yang dia bina dan terbangun sejak lama.
- l. Siasat dalam menjaga perolehan suara dengan mengutus saksi di setiap TPS yang berguna untuk mengantisipasi kelancungan yang ada dengan menurunkan setiap saksi di TPS yang dinamai saksi luar.



Gambar 3. 1

Foto relawan Muslimat NU kota Suarabaya saat mengikuti pelatihan kampanye simpatik pemenangan Khofifah-Emil di Jl. Doponegoro, Surabaya, Kamis 22/3/2018, (Foto dalam data no. 18).



Gambar 3. 2

Sejumlah Ulama dan anggota Muslimat NU di Sukolilo, Surabaya deklarasikan dukung Khofifah, (Foto dalam data no. 11).



Gambar 3. 3

Khofifah bersama jamaah Muslimat NU di Mojosari, Mojokerto (7/42018), dalam rangka memperingati Harlah Muslimat NU dan Isra' Miraj, (Foto dalam data no. 18).



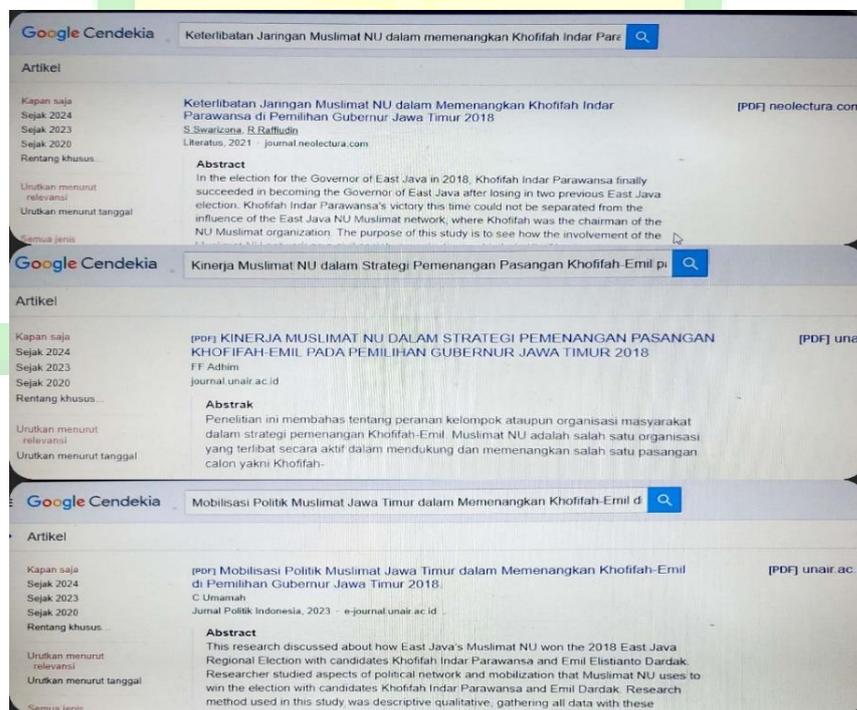
Gambar 3. 4

Khofifah Bersama Muslimat dan Fatayat NU Jombang, Kec. Diwek Kamis 29/3/2018, (Foto dalam data no. 19).



Gambar 3. 7

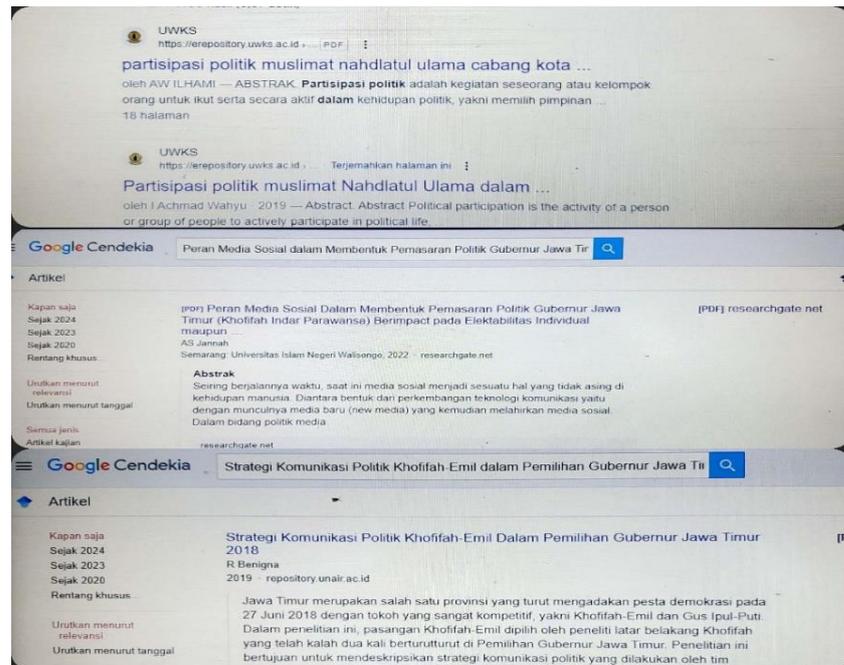
Foto spanduk seruan fatwa fardhu ‘ain dukung Khofifah (2).³⁴



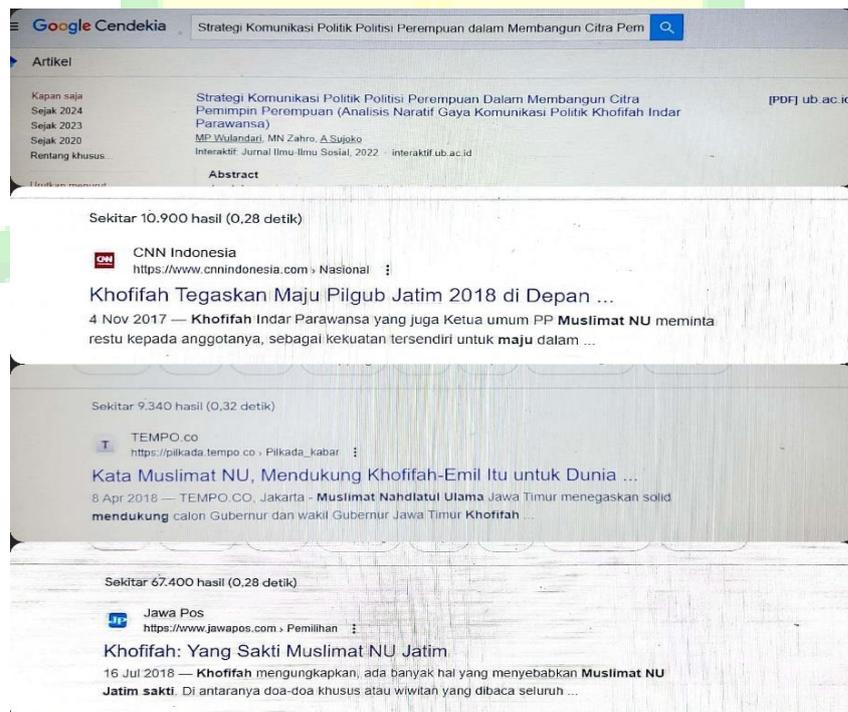
Gambar 3. 8

Sumber data pada tabel 3.2 nomor 1-3.

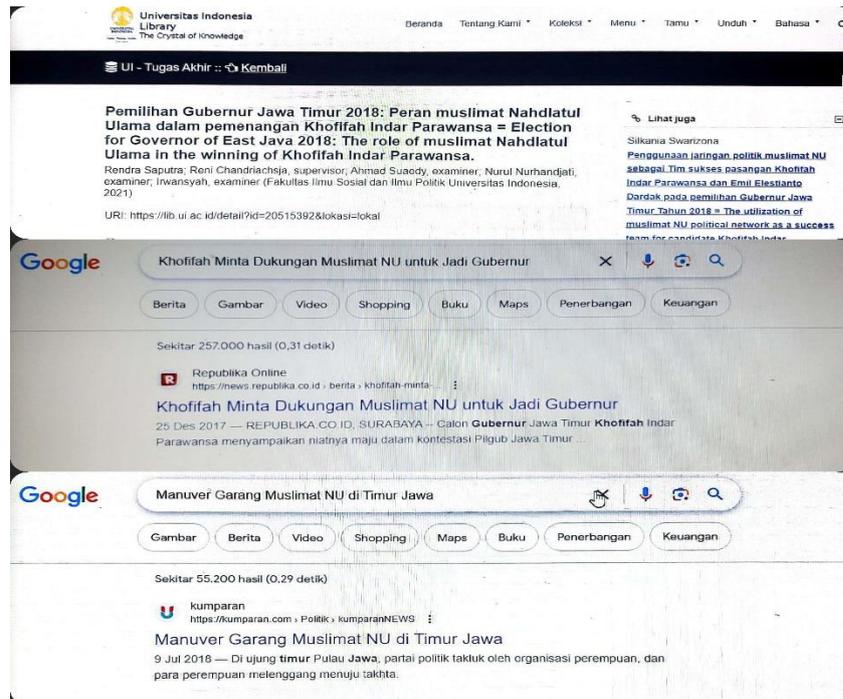
³⁴ Febriansyah Ariefana, “Fatwa Pilih Khofifah, Anak Muda Laporkan Kyai ke Polda Jatim,” suara.com, accessed March 9, 2024, <https://www.suara.com/news/2018/06/13/193602/fatwa-pilih-khofifah-anak-muda-laporkan-kyai-ke-polda-jatim>, (diakses pada tanggal 9 Maret 2024).



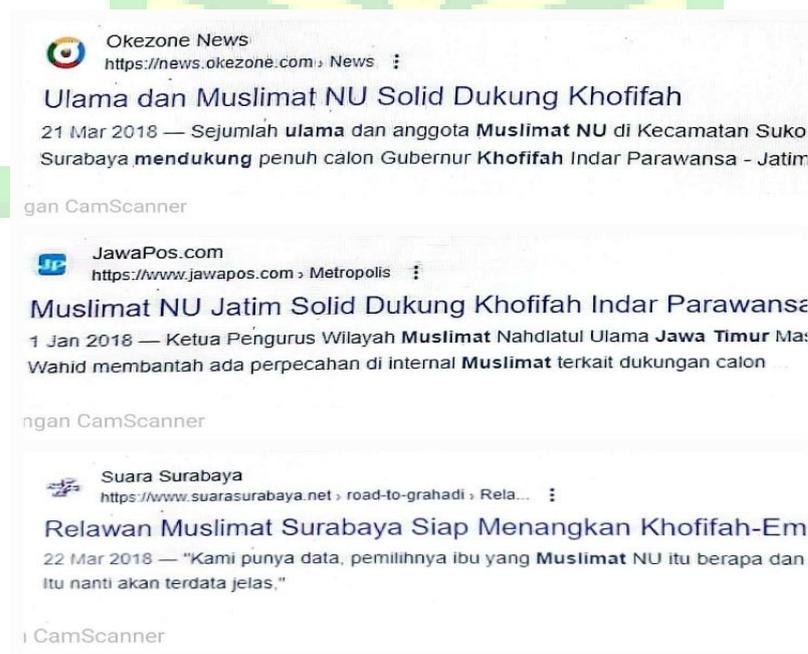
Gambar 3. 9
Sumber data pada tabel 3.2 nomor 4-6.



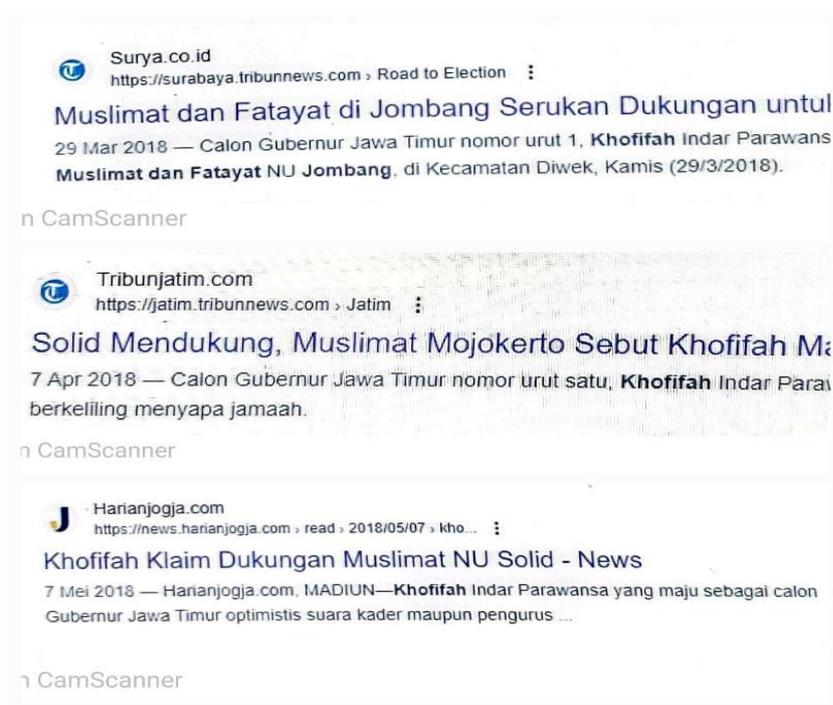
Gambar 3. 10
Sumber data pada tabel 3.2 nomor 7, 9, 10, 11.



Gambar 3.11
Sumber data pada tabel 3.2 nomor 8, 13, 14.



Gambar 3.12
Sumber data pada tabel 3.2 nomor 12, 15, 16.



Gambar 3. 13

Sumber data pada tabel 3.2 nomor 17-19

Data tersebut merupakan hasil dari pencarian penulis yang terdapat dari dalam risalah Jurnal, Artikel, dan Berita daring yang otentik, ditambah beberapa foto kegiatan. Adanya data tersebut kemudian akan diolah dan di analisis lagi pada sub bab selanjutnya sesuai dengan perspektif *fiqh siyāṣah*.

B. Peran Organisasi Keagamaan Sebagai Bentuk Upaya Menggalang Massa Oleh Seorang Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Menindaklanjuti hasil pemaparan data di atas yang menjelaskan tentang bagaimana proses kampanye dalam Pemilihan Gubernur Jatim tahun 2018, sesungguhnya dapat diketahui bahwa tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh politik identitas. Secara teori politik identitas bisa diartikan sebagai alat politik dengan menampilkan identitas formal seperti organisasi sosial, ras, etnis,

agama, suku, budaya dan sejenisnya guna memberi kesan pembeda dan persamaan. Definisi lain menyebutkan bahwa politik identitas adalah proses dialog sosial secara internal maupun eksternal mengacu pada sebagian kelompok masyarakat sembari menunjukkan sikap politisasi dengan tujuan agar dapat dukungan dari setiap kelompok masyarakat.

Keberhasilan Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2018 sudah menjadi fakta nyata bahwa siasat politik yang dilakukan tim pemenangan Khofifah-Emil dinilai sangat efektif. Tidak hanya usaha dari partai politik yang mengusung dan parpol pendukungnya yang berusaha untuk menaikkan elektabilitas Khofifah, namun adanya kelompok non partai yang ikut andil dalam proses kampanye Khofifah-Emil, juga sangat memberi pengaruh besar kepada hasil akhirnya. Kontribusi yang dilakukan oleh Muslimat NU tentu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih paslon nomor urut satu tersebut dengan berbagai strategi yang sudah dipaparkan di atas.

Keterlibatan Muslimat dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018 bukan hanya sekedar tuntunan moral begitu saja, melainkan dalam waktu yang sama adanya dua kader NU yang maju sebagai calon Gubernur Jatim 2018, tampaknya membuat arah pemilih pecah menjadi dua di kalangan warga nadhliyin. Kedua kader NU yang maju tersebut merupakan salah satu tokoh besar yang masing-masing memiliki basis pendukung yang berbeda. Misalnya Muslimat NU yang lebih condong mendukung pasangan Khofifah-Emil, serta GP Ansor yang

condong kepada pasangan Saifullah-Puti berdasar atas kepentingan simbolik, dan ikatan kader yang mengarah pada keduanya.³⁵

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, dapat dilihat peranan organisasi keagamaan (Muslimat NU) dalam upayanya menggalang masa oleh seorang calon Gubernur Jatim 2018 (Khofifah) pada dasarnya sudah tergambar pada rangkuman data di atas. Namun perlu difokuskan kembali bahwa awal dukungan Muslimat mulai terlihat saat Khofifah mengumumkan maju sebagai calon Gubernur Jatim tahun 2018, diikuti oleh permintaan Khofifah kepada Muslimat NU agar senantiasa mendukungnya. Perihal tersebut tertulis di siaran pers yang diterima *Republika.co.id*. senin (25/12).

Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat sudah seharusnya mendapat dukungan penuh oleh para kader dan anggota Muslimat NU dari berbagai kalangan struktural. Seperti istilah di atas menyebutkan “Pegang Kepala Ekor pun Ikut” atau dengan menggandeng ketuanya pasti barisan struktural dan anggotanya mengikuti. Dengan demikian permintaan Khofifah direspon positif oleh koordinator Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid yang mengatakan “kami Muslimat Jatim semuanya bersedia untuk mendukung ibu Khofifah” saat menghadiri rapat konsolidasi di Mojokerto 8 April 2018.

Korelasi politik yang dilakukan oleh koordinator Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid memiliki pengaruh besar dalam mengkampanyekan pasangan Khofifah-Emil secara langsung. Misalnya seperti memberi instruksi kepada

³⁵ Promise Prisaril Israfil, “POSISI POLITIS GERAKAN PEMUDA ANSOR PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018,” *Jurnal Politik Muda* 7 (2019): 7–8.

seluruh Muslimat di daerah Jatim agar setia mendukung pasangan Khofifah-Emil dan memperkuat integritas struktur Muslimat kala itu. Fakta selanjutnya saat melakukan wawancara dengan Kumparan pada 9 Juli 2018, Masruroh Wahid pun mengatakan bahwa upaya dia selain memberi instruksi, dia juga terjun secara langsung di lapangan ke tujuh koordinator tingkat daerah, cabang, hingga kecamatan dan desa. Setelah memastikan para anggotanya secara terpadu mendukung pasangan Khofifah-Emil, Masruroh menegaskan bahwa anggota Muslimat NU sangatlah loyal serta solid.³⁶

Hal itu juga disampaikan oleh Ainun Jariyah, Ketua Cabang Muslimat NU Sidoarjo di Jurnal milik Silkania Swarizona, dia mengatakan bahwa benar ada instruksi dari cabang Muslimat NU Jawa Timur untuk mendukung Ketum Muslimat Khofifah Indar Parawansa. Ainun menegaskan bahwa Muslimat taat pada Instruksi pemimpin. Lengkapnya:

“Anggota Muslimat sangat taat pada pimpinan, dari pusat hingga cabang. Instruksi melalui istigosah menandakan anggotanya sangat taat dan solid. Orang-orang Muslimat merasa ada ibunya sendiri yang maju, masa mau pilih orang lain, jadi tetap tidak terpengaruh dengan yang lain.”

Bentuk peran lain yang dilakukan oleh Khofifah dalam menggandeng Muslimat sebagai mesin politiknya antara lain dapat dilihat dari segi dimensi posisinya sebagai Ketum Muslimat NU, yang mana dapat mengubah persepsi aktor lainnya dalam menentukan pilihan yang sama dan merawat jaringan politik yang sudah terbangun cukup lama di lingkungan Muslimat NU. Kemudian Khofifah juga menambahkan program-program kesejahteraan untuk kelompok

³⁶ Silkania Swarizona., 5.

perempuan yang berisi poin-poin pokok dengan harapan dapat mewujudkan kaum perempuan Indonesia yang bertakwa, berkualitas dan mandiri. Serta beberapa program berbentuk modal usaha terhadap kelompok perempuan.³⁷

Menurut keterangan Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil, M. Roziqi dalam Jurnal milik Silkania Swarizona menyebutkan bahwa, Muslimat NU ialah organisasi yang solid dan Khofifah berhasil membimbing anggotanya agar tetap mendukungnya di Pilgub Jatim tahun 2018. Lengkapnya;

“Muslimat ternyata organisasi yang sangat solid dan luar biasa, saat di Gerakan organisasi ini bisa menggiring para pemilihnya. Bagaimana kalau mbok e nyalon dan anggotanya nggak milih, kan kasian sudah dua kali. Saya sendiri mengakui bahwa bu Khofifah sangat handal dalam mempengaruhi anggotanya, setelah saya lihat bu Khofifah ternyata orang panggung. Dengan kecakapannya dia tidak capek, dia bahkan keliling terus keseluruhan wilayah di Jawa Timur.”

Adapun strategi Khofifah dalam memanfaatkan jaringan Muslimat NU menurut M. Roziqi pada Pemilihan Gubernur Jatim 2018 antara lain:

1. Digunakan untuk meraih perhatian, dukungan formal dan simpati dari masyarakat dan para tokoh tersohor di Jawa Timur untuk mendukungnya.
2. Memobilisasi sumber daya kultural, seperti masuk melalui pengajian-pengajian yang diadakan di setiap Kabupaten/Kota. Di tambah dengan pemberian beasiswa guru diniyah.

³⁷ Silkania Swarizona and Riety Raffiudin, 5–6.

3. Memobilisasi sumber daya material, yang biasanya terdiri dari modal finansial, uang, properti atau bangunan. Tidak jarang biaya dalam berkampanye yang dikeluarkan banyak dibantu oleh para relawan.

Tiga strategi ini dinilai sangat efektif dan bermanfaat bagi Khofifah serta Muslimat NU, sebab relasi keduanya memang sudah terjalin cukup lama hingga memunculkan sikap solid kepada sesamanya. Khofifah sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, sesungguhnya dapat memberi gambaran akan kesamaan ideologi, kepentingan, perjuangan, tujuan dan kekeluargaannya yang sudah terbangun cukup lama. Sehingga wajar saja bila mana loyalitas Muslimat NU kepada Khofifah yang maju sebagai calon Gubernur mendapat dukungan penuh dari kelompoknya. Terbentuknya politik identitas pada hal ini memanglah sangat wajar, karena secara psikologis dasar hubungan yang terbentuk akibat pengalaman yang panjang akan membawa alam bawah sadar seseorang untuk saling mendukung dan mengerti kepada satu sama lain.

Selanjutnya terkait faktor yang menjadikan strategi Khofifah-Emil sangat efektif juga tidak terlepas dari faktor sosial budaya masyarakat Jawa Timur. Dengan basis dominasi jamaah Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia, serta dukungan dari para kiai, pengasuh pondok dan para santri di belakangnya yang menjadi faktor penting dalam proses politiknya. Namun kembali lagi kepada kapasitas Muslimat NU sendiri yang loyalitas dan solidaritasnya sudah tidak diragukan lagi dalam memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi dukungan kepada paslon nomor satu tersebut. Bahkan ada ungkapan

yang disampaikan oleh Eva Sundari, salah satu politisi PDI-P menyebutkan Muslimat NU adalah organisasi yang loyal serta solid.³⁸

Dengan penjabaran demikian, keterlibatan Muslimat NU dalam proses politik tentunya sangat memberi pengaruh besar terhadap kemenangan pasangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2018. Secara teoritis usaha kelompok atau individu yang ikut berkontribusi dalam proses politik biasa disebut sebagai partisipasi politik. Hubungan pengaruh organisasi sebagai wadah partisipan politik bagi masyarakat dinilai dapat memberi ruang akses yang besar. Sebab karenanya organisasi bisa dijadikan suatu alat politik dalam menggalang massa yang jumlahnya besar di era zaman modern ini jelasnya.

Sesuai dengan kajian teori sebelumnya, Miriam Budiarto mendefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan agar terlibat dalam proses politik. Kelompok atau organisasi yang mengacu pada persamaan ras, suku, agama tertentu yang independen tidak bisa disebut sebagai pelaku politik identitas. Namun apabila salah satu kelompok atau anggotanya masuk dalam kehidupan politik dan secara terang-terangan mengambil keuntungan dengan menggerakkan komunitasnya sebagai alat untuk menggalang massa pada saat politik, maka kelompok tersebut dapat dikategorikan masuk sebagai politik identitas karena mengambil peran dalam proses kehidupan politik.

³⁸ Maulina Pia Wulandari., 16.

C. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Organisasi Keagamaan Sebagai Bentuk Upaya Menggalang Massa Oleh Seorang Calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2018

Untuk mencapai kehidupan bernegara yang kuat akan persatuan umat dan bangsa di dalamnya, agama Islam mengajarkan bahwa pentingnya ada sosok seorang pemimpin yang ideal diantara umat-umat tersebut. Selain Islam mengajarkan agar selalu ada sosok pemimpin yang ideal, Islam juga memperhatikan tentang bagaimana proses politik pemimpin itu bisa dengan sah mendapatkan jabatannya. Berkaca pada sejarah peradaban Islam, Rasulullah sendiri juga mengajarkan tentang caranya berpolitik saat beliau mulai hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kala itu langkah politik nabi mengorganisir penduduk Madinah yang sifatnya pluralistik serta heterogen menjadikan hal tersebut ke dalam sejarah permulaan organisasi politik dalam Islam.

Pembentukan masyarakat baru di Madinah berimplikasi dengan lahirnya suatu negara dan pemerintahan baru yang ditegaskan melalui konvensi atau perjanjian tertulis yang dikenal sebagai Piagam Madinah tahun 622 M. Legitimasi dari masyarakat yang mengangkat Nabi selaku kepala negara dan Madinah ibarat sebagai negaranya, menjadikan Piagam Madinah sebagai alat pemersatu umat yang berisi berbagai prinsip sosial di dalamnya. Misalnya seperti prinsip umat, persatuan, persamaan, kebebasan, tolong menolong, perdamaian dan keadilan dalam proses bernegara maupun politik.

Melihat kondisi masyarakat Madinah saat itu yang nyaris sama dengan keadaan bangsa Indonesia yang heterogen. Pengaruh keberagaman masyarakat

tentu menjadi harapan besar terhadap tumbuhnya peradaban sosial politik di negara Indonesia. Kemajemukan dalam politik melahirkan akun baru yang disebut sebagai politik identitas. Beberapa tahun yang lalu rakyat Indonesia menyaksikan sendiri bagaimana lahirnya politik identitas secara formal dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Bermula dari kejadian ini yang mengilhami daerah-daerah lain untuk mengikuti gaya politik yang sama dalam hal identitas, tidak terkecuali hal tersebut juga terjadi pada daerah Jawa Timur khususnya pada Pemilihan Gubernur Jatim tahun 2018.

Menurut agama Islam pengaturan kehidupan politik dan bernegara dalam bidang ilmu yang mempelajarinya saat ini masuk dalam bagian *fiqh siyāsah*, yang prinsipnya masuk ke dalam kategori *siyāsah syar'iyah*. Secara teori *siyāsah syar'iyah* adalah konsep politik Islam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk mengatur tentang proses politiknya. Meninjau pelaksanaannya yang dilakukan secara demokratis, menurut *siyāsah syar'iyah* untuk mewujudkan keseimbangan antar pemilih, masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan arah partisipasinya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip kebebasan secara *dusturiyāh*, kaitanya dengan UUD 1945 yang menjamin atas kebebasan warga Indonesia untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara umum, serta memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam kehidupan bernegara maupun politik.

Pada prinsipnya penerapan *siyāsah syar'iyah* berdasar pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat Ulama. Dengan merealisasikan hukum Islam sebagai pondasi dasar politik serta menerapkan setiap prinsip *siyāsah syar'iyah* seperti

halnya keadilan, persamaan dan musyawarah, tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU di atas hakikatnya ialah sejalan dengan ciri-ciri politik hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*), sebab rangkaian kegiatannya mengarah pada ideologi agama demi meraih kemaslahatan umat dan individu.

Dengan hal ini prinsip *siyāsah syar'iyah* dalam manajemen bangsa yang majemuk harus berdasar pada prinsip musyawarah, mufakat serta mengemban nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh. Sebab adanya perbedaan juga melahirkan kepentingan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda, perasaan, dan tujuan yang berbeda. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang bermacam-macam tersebut hendaknya mengacu pada prinsip musyawarah, persamaan, dan keadilan, yang dalam hal ini kaitanya dengan organisasi keagamaan tentunya berdasar pada tuntunan syariah.³⁹

Selanjutnya dengan adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan bebas dalam memperjuangkan hakya secara kolektif yang dijamin oleh UUD, dalam *fiqh siyāsah* juga mengenal adanya demokrasi dalam politik Islam. Nilai demokrasi dalam syariat Islam memang sejalan dengan prinsip keadilan, musyawarah yang berkaitan dengan ideologi bangsa serta prinsip politik yang bersendikan pada hukum syara'. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi antaralain:⁴⁰

1. Toleransi

³⁹ Beni Ahmad Saebani., 126.

⁴⁰ FISIP Unpad, Badan Pengkajian MPR, ed., Kajian Akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, Cetakan pertama (Jakarta, Indonesia: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 15–17.

2. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat serta menghormatinya
3. Kepekaan terhadap kemajemukan masyarakat
4. Terbuka dalam komunikasi serta menjunjung tinggi nilai HAM
5. Menyadari potensi diri sendiri dalam menjaga kebersamaan dan keseimbangan dalam masyarakat majemuk.

Dalam tinjauan tersebut kecenderungan prinsip demokrasi untuk menyadari adanya kemajemukan berpotensi melahirkan banyak identitas sosial dalam masyarakat. Kaitanya dengan politik identitas yang disamakan dalam organisasi keagamaan di atas, dapat dinilai sudah menjadi fitrah tersendiri apabila dikaji dalam prinsip demokrasi. Apalagi organisasi keagamaan memiliki basis ideologi yang kuat serta menjadi wadah masyarakat dalam mengemban nilai-nilai Islam berbasis Ahlus sunnah wal jama'ah. Harapannya jelas berpengaruh dalam mewujudkan tatanan demokrasi Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman hidup bersama-sama bagi umat Islam dalam kehidupan politik.

Adanya politik identitas juga bisa menandakan adanya proses dialog sosial yang dilakukan oleh berbagai macam golongan tersebut. Maka dengan adanya prinsip musyawarah, kebebasan, dan toleransi diharapkan dapat jadi bahan pertimbangan moral terhadap perbedaan pandangan dan kepentingan politik, serta faktor-faktor umum yang berpengaruh saat proses politik terjadi. Perbedaan sudah menjadi *sunnatullah*, ketika kemajemukan dapat disadari dengan adanya demokrasi yang menghendaki kebebasan berekspresi, namun harus tetap menjaga rasa saling toleransi dan menjunjung tinggi nilai persatuan.

Kuatnya nilai-nilai agama Islam dalam menjaga moral politik, tentunya bersamaan dengan kesediaan menghormati perbedaan tanpa saling memaksakan kehendaknya masing-masing.

Berdasar pada perspektif *fiqh siyāsah*, landasan demokrasi modern saat ini kenyataannya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah. Sebab keduanya sama-sama mengemban prinsip keadilan, persatuan, persamaan, kebebasan, kerja sama, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang seimbang, atau tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas saat itu. Adanya jaminan kebebasan yang tertuang pada prinsip demokrasi Islam diharapkan dapat memberi peluang bagi setiap identitas untuk menjaga eksistensinya di dalam kehidupan politik agar hak dan kewajibannya selalu terjaga. Dengan merealisasikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam bertindak, diharapkan dapat mencegah adanya eksploitasi terhadap politik identitas yang berlebihan.

Baik buruknya politik identitas, dalam keabsahannya Nabi mengharamkan umatnya untuk saling memaki dan melaknat orang lain. Sebab hal demikian bukan termasuk ciri-ciri muslim sejati. Kemudian untuk menjaga kestabilan politik hukum Islam dan demokrasi tetap utuh, di dalam nilai dasar *fiqh siyāsah* juga menekankan nilai toleransi dalam politik Islam. Dalam negara yang masyarakatnya sangat beragam, tentu untuk menghindari ancaman rusaknya nilai persatuan yang sudah dibangun sejak lama ini, solusi terbaik adalah dengan adanya prinsip demokrasi Islam dan nilai toleransi yang menyeluruh tanpa harus saling terpisahkan dalam kehidupan sosial maupun politik.

Menurut pendapat dari Nurcholish Madjid, adanya masyarakat madani atau *civil society* dianggap memberi isyarat bahwa identitas yang dimiliki bersama, setidaknya harus melalui persetujuan tentang garis-garis dan batas politik. Konsekuensi dari penguatan *civil society* atas campuran dari berbagai asosiasi mengandung makna toleransi dan kesediaan setiap individu untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial.⁴¹

Dengan adanya toleransi politik dalam Islam, sesungguhnya menjauhkan dari berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji dari sesama manusia dalam politik. Tentang hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

Artinya, “Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”

Dalam hal ini peran Muslimat NU sebagai organisasi otonom Nahdlatul Ulama dan Khofifah sebagai seorang nahdliyin sejati tentu sangat menjaga sikap politiknya agar sejalan dengan nilai agama dan konstitusi. Adapun prinsip politik yang selalu menjadi landasan gerak warga nahdliyin adalah:⁴²

1. Moderat dengan menjaga lima prinsip asasi manusia
2. Keseimbangan terhadap kaidah, rasio, teks, dan realitas

⁴¹ Beni Ahmad Saebani., 164.

⁴² Moh Rosyid, “Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam,” *Addin* 9, no. 1 (2015): 22.

3. Tegak pondasi agamanya atau tidak gampang terprovokasi
4. Menjunjung tinggi sikap toleran sesuai perintah Rasulullah.

Prinsip-prinsip yang dibangun dalam pemerintahan dan politik tentu menjadikan landasan nilai Islam sebagai parameter terbaik guna mencapai politik yang sehat dan profesional. Wujudnya dengan pengamalan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan ide dasar kehidupan politik yang demokratis dan mengembalikan segala pertentangan dalam politik kepada firman Allah dan sabda Rasulullah untuk mencari solusi terbaik bagi setiap masalah kehidupan politik suatu negara, tak terkecuali persoalan politik identitas.

Sebagaimana yang telah diungkapkan di awal, organisasi keagamaan merupakan suatu wadah penting yang digunakan untuk memelihara umat. Adanya organisasi keagamaan dapat dijadikan solusi sebagai wadah dalam pendidikan karakter, moral, demokrasi, dan yang paling utama untuk dakwah agama Islam dikalangan masyarakat luas. Terpisah dengan praktik politik yang terjadi mungkin sudah tidak bisa dilepaskan dan bukan rahasia umum lagi. Agama Islam secara relasi dan ilmunya tentu tidak melepaskan dirinya dari persoalan kekuasaan, Islam hadir untuk memperbaiki kekuasaan tersebut dan menjaganya agar jauh dari penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian setelah dianalisis secara menyeluruh, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh Muslimat sejatinya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariat agama Islam dan tidak pula bertentangan dengan nilai konstitusi. Akan tetapi jika dikembalikan pada pengertian politik identitas secara murni, tentu

banyak argumen mengatakan bahwa politik identitas itu dilarang. Salah satunya argumentasi yang terdapat dalam skripsi Achmad Junaedy Muchtar yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden tahun 2019”. Dia berpendapat bahwa politik identitas tidak dibolehkan menurut syariat Islam karena bertentangan dengan nilai keadilan, persamaan, kehormatan manusia, toleransi hingga perilaku moral yang baik.

Selanjutnya pendapat lain yang membolehkan politik identitas juga pernah disampaikan oleh Rektor Universitas Muhamadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod, M.SI., menurutnya dalam konteks demokrasi, tidak ada permasalahan terkait penggunaan identitas tertentu dalam berpolitik, selagi dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi serta tidak kontradiktif dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal yang salah, apabila jika memilih mendasarkan pada pertimbangan identitas seperti agama atau etnis yang bersamaan dengan menjelek-jelekan agama atau etnis lain, serta mengabaikan prinsip-prinsip toleransi yang baik.⁴³

Dengan demikian solidaritas Muslimat NU sebagai bentuk upaya menggalang massa oleh Khofifah yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur dianggap sesuatu yang alamiah jika digagas dari pemikiran Ibn Khaldun tentang *Āshābiyah*. Secara umum *Āshābiyah* yang merujuk pada ikatan sosial atau kelompok sosial sangat menentukan keberlangsungan hidup

⁴³ Dinar Meidiana, “Politik Identitas. Agama dan Etnisitas dalam Dinamika Politik Indonesia,” Universitas Muhammadiyah Jakarta, August 15, 2022, <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/08/politik-identitas-agama-dan-etnisitas-dalam-dinamika-politik-indonesia/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

suatu negara apabila ditanamkan rasa solidaritas dan kerja sama atas kesatuan sosial mulai dari kelompok terkecil hingga terbesar. Dia berpendapat bahwa, semangat persatuan rakyat yang lahir melalui peran agama sesungguhnya tidak dapat ditandingi oleh semangat persatuan yang lain.⁴⁴

Sedangkan kalau kita mengambil hikmah atas perjalanan Islam di masa lalu yang berkaitan dengan politik serta kemajemukan. Rasulullah sendiri mengajarkan pentingnya prinsip *ummah*, persaudaraan, persamaan, serta tolong menolong dalam membentuk kerukunan antar umat beragama serta berbagai macam identitas politik masa itu. Selanjutnya nilai-nilai dasar dalam *fiqh siyāsah* juga menjelaskan bahwa kesadaran akan kemajemukan bukanlah sesuatu yang dapat memecah belah tali persaudaraan antar sesama umat. Justru dengan adanya prinsip-prinsip *siyāsah syar'iyah*, demokrasi dalam politik Islam, toleransi politik dalam Islam, dan prinsip-prinsip Piagam Madinah di atas, tentu dapat dijadikan sebagai pertimbangan moral dalam menjalankan kehidupan politik yang sehat dan mencegah adanya perpecahan persatuan akibat adanya eksploitasi terhadap politik identitas yang berlebihan.

Keseimbangan kekuatan ini juga menjadi unsur yang sangat diperlukan dalam tatanan demokrasi di negara majemuk. Salah satunya wujud demokrasi itu sendiri ialah harus mencerminkan adanya warna “Kebhinekaan” bukan hanya “ketunggal-lkaan”. Konsekuensi adanya perbedaan harusnya bisa dimakanai secara dewasa sebagai wujud toleransi antara kaum mayoritas dan

⁴⁴ Nurul Huda, “Pemikiran Ibn Khaldun Tentang *Āshābiyah*” 20 (2008): 4–6.

minoritas agar partisipasi politik berjalan lebih kondusif. Jaminan kebebasan atas komunikasi politik di ruang publik nantinya akan memberi persamaan yang adil bagi setiap masyarakat dalam berkompetisi dan memperjuangkan haknya secara kolektif di luar sana.⁴⁵

Selanjutnya dalam konteks demokrasi, adanya Pemilu dianggap sebagai sarana atau wadah alternatif yang dapat menampung segala kepentingan, kecemasan, dan tujuan bagi setiap identitas sosial di dalam politik. Dengan begitu adanya identitas dalam politik menurut pendapat dari Amy Gutmann dianggap sebagai sesuatu yang legal dan dia berkeyakinan bahwa demokrasi tidak hanya tentang tujuan rasional, tetapi juga tentang identitas sosial. Selain itu Amy Gutmann juga mencantumkan tiga kategori pemanfaatan identitas dalam demokrasi, diantaranya:⁴⁶

1. *Good* (beradab). Politik identitas bisa menjadi manfaat atau beradab dalam demokrasi seandainya sejalan dengan menanamkan nilai solidaritas guna mencegah diskriminasi dan kebencian terhadap kelompok lain.
2. *Ugly* (tidak beradab). Dalam kategori ini politik identitas tidak mencerminkan sikap solidaritas serta toleransi, dan menjadi berbahaya jika dilakukan dengan memupuk narasi rasis dalam konteks politik.

⁴⁵ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi politik Indonesia: dinamika Islam politik pasca-Orde Baru*, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 94.

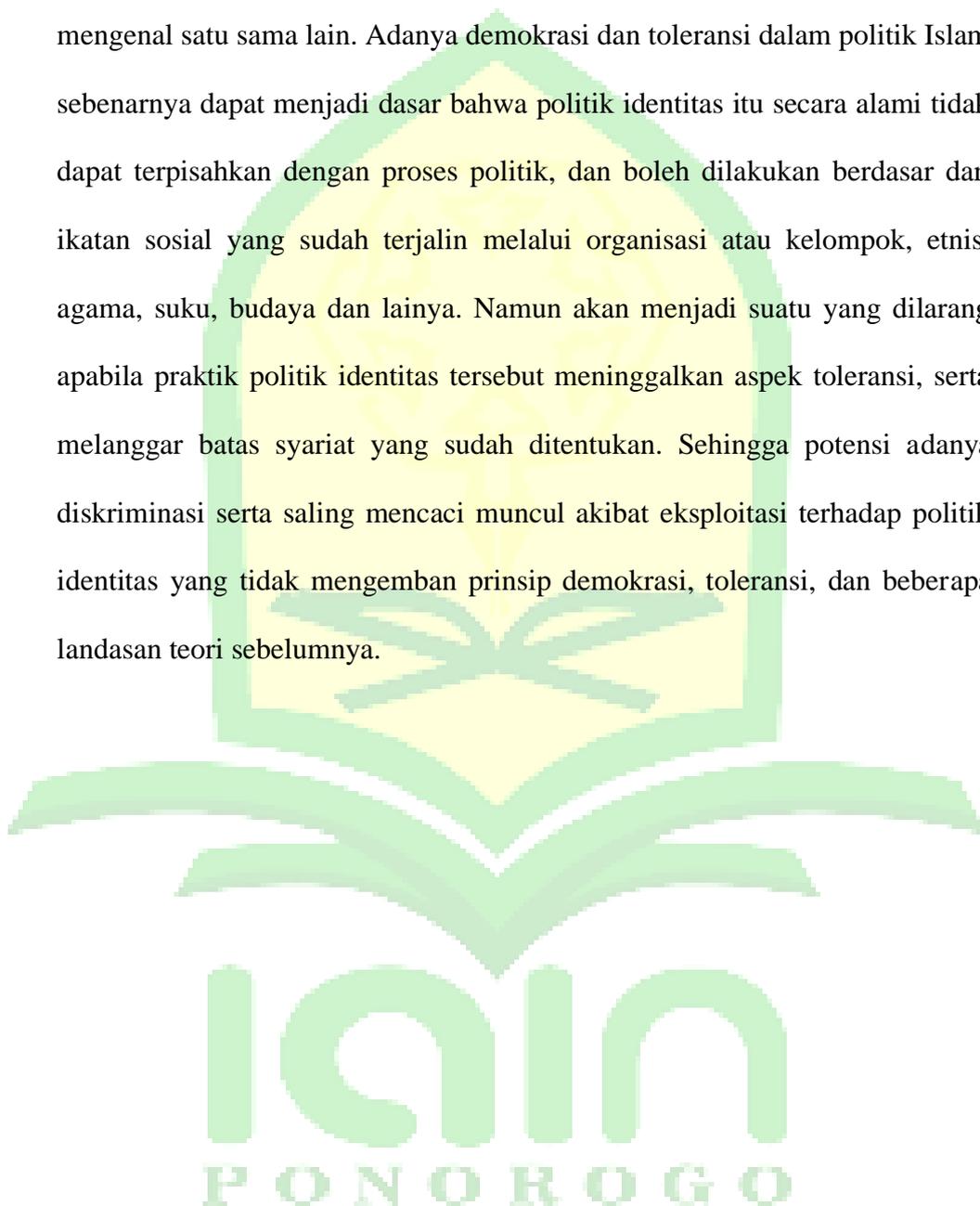
⁴⁶ M. Iqbal Ahnaf, "Politik Identitas Tak Terhindarkan, Dan Tak Selalu Buruk," *Https://Crcs.Ugm.Ac.Id* (blog), accessed March 13, 2024, <https://crcs.ugm.ac.id/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu-buruk/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024).

3. Kategori *Bad*. Dalam kategori ini pendidikan terhadap etika politik identitas dilakukan secara samar-samar, minimal tindakan-tindakan politik identitas tidak sampai merusak iklim demokrasi yang berjalan.

Dengan pertimbangan teori dan analisis tersebut penulis menegaskan bahwa politik identitas yang dilakukan oleh seorang calon Gubernur Jatim tahun 2018, adalah sebuah bagian yang tidak menyalahi batas-batas syariat secara utuh. Peralnya selain Muslimat NU, bentuk kampanye lain seperti fatwa fardhu 'ain memilih Khofifah-Emil yang dikeluarkan oleh kiai juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat secara luas. Sebab hal tersebut sama saja menuduh umat Islam yang memilih paslon Saifullah-Puti berkhianat kepada Allah dan Rasulullah. Hal semacam ini sesungguhnya menjadi catatan bagi penulis bahwa, penggunaan simbol keagamaan yang tidak bijak juga bisa berdampak buruk dan beresiko memicu perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang mana membuat arah pemilih menjadi was-was dan terasa ambigu.

Pembahasan politik identitas dalam isu keagamaan kerap menjadi perhatian publik karena dinilai negatif oleh beberapa kalangan tertentu, tanpa melihat dan mengkaji lebih dalam lagi. Analisis pada keabsahan politik identitas pada organisasi keagamaan tertentu dapat menghadirkan dua makna berbeda. Secara terpisah simbol agama itu identik dengan kebenaran absolut yang dipakai dalam proses politik, maka tinjauan yang dipakai dan digunakan oleh penulis juga bagian dari komposisi nilai agama Islam yang terkandung dalam *siyāṣah syar'iyah*, konsep *ummah*, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah serta beberapa doktrin hukum di atas.

Pertimbangan moral akan kesadaran kemajemukan harusnya patut untuk disadari sejak dini terlebih Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sendiri menegaskan bahwa adanya keberagaman harusnya dapat disadari untuk saling mengenal satu sama lain. Adanya demokrasi dan toleransi dalam politik Islam sebenarnya dapat menjadi dasar bahwa politik identitas itu secara alami tidak dapat terpisahkan dengan proses politik, dan boleh dilakukan berdasar dari ikatan sosial yang sudah terjalin melalui organisasi atau kelompok, etnis, agama, suku, budaya dan lainnya. Namun akan menjadi suatu yang dilarang apabila praktik politik identitas tersebut meninggalkan aspek toleransi, serta melanggar batas syariat yang sudah ditentukan. Sehingga potensi adanya diskriminasi serta saling mencaci muncul akibat eksploitasi terhadap politik identitas yang tidak mengemban prinsip demokrasi, toleransi, dan beberapa landasan teori sebelumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap politik identitas dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 perspektif *fiqh siyāsah* di atas, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, antara lain:

1. Dalam analisis rumusan masalah yang pertama, penulis megemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dukungan Muslimat NU kepada Khofifah-Emil di Pilgub Jatim tahun 2018 didasarkan atas permintaan dukungan Khofifah kepada Muslimat. Selain itu juga mengingat faktor relasi yang terbangun antara Muslimat NU dengan Khofifah selaku Ketum Muslimat NU setidaknya dapat mengubah persepsi aktor lainnya dalam menentukan pilihan yang sama, sebab dasar persamaan ideologi, identitas, cita-cita dan pengaruh hubungan batin.
2. Kesimpulan dari analisis rumusan masalah kedua, penulis menegaskan bahwa politik identitas yang dilakukan oleh seorang calon Gubernur Jatim tahun 2018 adalah sebuah bagian yang tidak menyalahi batas-batas syariat secara utuh. Sebab seluruh rangkaian yang dilakukan oleh Muslimat NU sejatinya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariat agama Islam dan tidak pula bertentangan dengan nilai konstitusi, walaupun ada sedikit catatan dari penulis terhadap penggunaan fatwa fardhu 'ain memilih Khofifah-Emil yang kiranya kontradiktif dan tidak politis dalam proses politik saat itu. Pertimbangan ini berdasar pada nilai-nilai dasar yang

terkandung dalam *fiqh siyāsah*, yang mana hakikatnya seluruh rangkaian kegiatan Muslimat sejalan dengan prinsip dasar *siyāsah syar'iyah*, demokrasi, dan toleransi politik Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran dan rekomendasi yang penulis ajukan guna menjaga iklim politik tanah air stabil dari maraknya politik identitas. Sebagai perhatian khusus bagi badan legislatif, KPU, dan Bawaslu, penulis merekomendasikan kedepannya agar ditambahkan norma khusus yang mengatur tentang masalah politik identitas dalam Pemilu/Kada. Sebab banyaknya doktrin mengenai pro dan kontra terkait masalah politik identitas dalam proses politik, tentu tidak dapat menjamin kepastian hukum yang ada dapat di eksekusi dengan maksimal. Oleh karena itu perlunya aturan yang spesifik mengatur batasan, larangan, dan sanksi bagi subjek politik yang sengaja melakukan eksploitasi terhadap politik identitas yang berimplikasi pada penegakan hukum kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afala, Machdani. Politik identitas di Indonesia. Edisi revisi. Malang, Indonesia: UB Press, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyāsah* Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Badan Pengkajian MPR, FISIP Unpad, ed. Kajian Akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia. Cetakan pertama. Jakarta, Indonesia: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Castells, Manuel, and Manuel Castells. *The Power of Identity*. 2. ed., with A new pref., [Nachdr.]. *The Information Age: Economy, Society and Culture / Manuel Castells*, Vol. 2. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
- Dedi Syarial, Syah Maburur. *Fiqh Siyāsah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi politik Indonesia: dinamika Islam politik pasca-Orde Baru*. Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muktasim, et. al., Iskandar Zulkarnaen. *Buku Politik Praktik Siyāsah* Syariah Aceh. Cetakan pertama. Syiah Kuala, Banda Aceh, Provinsi Aceh: Bandar Publishing, 2021.
- Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Serentak Gelombang Ke-3 Tahun 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018.

Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik. Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018 Jawa Timur Province in Figures 2018. Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur/BPS-Statistics of Jawa Timur Province, 2018.

Pulungan, Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

Santoso Az., Lukman. Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. 1st ed. Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016.

Siddiq Armia, Muhammad. Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.

Suryadi Bakry, Umar. Multikulturalisme & Politik Identitas Dalam Teori Dan Praktik. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Referensi Artikel Ilmiah

Adhim, Fatikh Fauzal. “Kinerja Muslimat NU Jawa Timur Dalam Strategi Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018,” 2019.

Anam, Haikal Fadhil. “Politik Identitas Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Politik Islam, *POLITEA* 2, no. 2 (2019).

Benigna, Rafaela. “Strategi Komunikasi Politik Khofifah-Emil Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.” PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2019. <https://repository.unair.ac.id/87300/>.

Faqih, Muhammad. “Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam.” *Al’Adalah* 24, no. 1 (April 30, 2021): 19–28.

- Fatiha, Alifia Silvi, and Wahyuningsih Santosa. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 345–52.
- Fautanu, Idzam, M. Buhori, and Heri Gunawan. "Politik Identitas Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid." *Politicon* 2, no. 2 (2020): 87–112.
- Fikri, Muhammad Sirajudin, and Nico Oktario Adytyas. "Politik Identitas Dan Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal)." *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 18, no. 2 (2018): 167–81.
- Harahap, Solehuddin. "*SIYASAH SYARI'YAH* DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Herianto, Hubertus, and Robertus Wijanarko. "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan Di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (2022): 53–64.
- Huda, Nurul. "Pemikiran Ibn Khaldun Tentang *Āshābiyah*" 20 (2008): 41–52.
- Israfil, Promise Prisar. "POSISI POLITIS GERAKAN PEMUDA ANSOR PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018." *Jurnal Politik Muda* 7 (2019): 1–12.
- Jannah, Ayu Surita. "Peran Media Sosial Dalam Membentuk Pemasaran Politik Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) Berimpact Pada Elektabilitas Individual Maupun Organisasi." Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, Malang, and Muhtar Haboddin. "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal." *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (February 1, 2012): 109–26.
- Lestari, Dina. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.
- Miskari, Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 57.
- Muthohirin, Nafik. "Politik Identitas Islam Dan Urgensi Pendidikan Multikultural." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2019).

- Nurdin, Muh Kasogi. "Democratic Values Dan Toleransi Politik Pada Mahasiswa Beragama Islam Di Kota Makassar." *Islamic Insights Journal* 3, no. 2 (2021): 33–48.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).
- Rohim, Ainur, and Mayuko Galuh Mahardika. "Pembelahan Politik Kiai NU Di Pilgub Jatim 2018." *Jurnal Transformative* 4, no. 2 (2018): 60–78.
- Romadhon, Sukron, and Try Subakti. "Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.
- Rosyid, Moh. "Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam." *Addin* 9, no. 1 (2015).
- Sari, Ranny Winda Kartika. "Strategi Pemasaran Politik Pasangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
- Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Swarizona, Silkania, and Riaty Raffiudin. "Keterlibatan Jaringan Muslimat NU Dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa Di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018." *LITERATUS* 3, no. 1 (April 15, 2021): 1–9.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Umamah, Chaniin. "Mobilisasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: Studi Muslimat Jawa Timur Dalam Memenangkan Pencalonan Khofifah–Emil." PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2019. <https://repository.unair.ac.id/91799/>.
- Wingarta, I. Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I. Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24.
- Wulandari, Maulina Pia, Maharina Novia Zahro, and Anang Sujoko. "Strategi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin

Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar Parawansa).” *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2022): 26–49.

Zulaikha, Nur Hamidah. “Analisis Framing Pemberitaan Pilgub Jawa Timur 2018 Pada Situs Berita Daring Indonesia.” *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (2019): 91–110.

Referensi Skripsi

Achmad, Junaedy Muchtar. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.” Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Andy, Prima Sahalatua. “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Dki Jakarta Periode 2017-2022,” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023.

Ilhami, Achmad Wahyu. “Partisipasi Politik Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Gubenur Jawa Timur Tahun 2018.” Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.

Nurfadilah, Sifa, Abdul Hamid, and M. Dian Hikmawan. “Partisipasi Politik Civil Society Dalam Pilkada (Studi Kasus Rumah Dunia Dalam Pilkada Banten 2017).” Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

Silmi, Susanti. *Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Zharfandy, Irfan. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.” B.S. Skripsi, FISIP UIN Jakarta, 2016.

Referensi Internet

Administrator. “Pilgub Jatim dan Politik Agama - Jawa Pos.” *Pilgub Jatim dan Politik Agama - Jawa Pos*, November 24, 2017. <https://www.jawapos.com/sudut-pandang/01129577/pilgub-jatim-dan-politik-agama>, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023).

- Ahnaf, M. Iqbal. "Politik Identitas Tak Terhindarkan, Dan Tak Selalu Buruk." *Https://Crcs.Ugm.Ac.Id* (blog). Accessed March 13, 2024. <https://crcs.ugm.ac.id/politik-identitas-tak-terhindarkan-dan-tak-selalu-buruk/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024).
- A, Nadza Qurrotun. "6 Budaya dan Tradisi Jawa Timur yang Dikagumi Dunia." *Detikjatim*, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7000628/6-budaya-dan-tradisi-jawa-timur-yang-dikagumi-dunia>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2024).
- Ariefana, Febriansyah. "Fatwa Pilih Khofifah, Anak Muda Laporkan Kyai ke Polda Jatim." *suara.com*. Accessed March 9, 2024. <https://www.suara.com/news/2018/06/13/193602/fatwa-pilih-khofifah-anak-muda-laporkan-kyai-ke-polda-jatim>, (diakses pada tanggal 9 Maret 2024).
- Astungkoro, Ronggo. "Pertarungan antara Khofifah-Gus Ipul akan Berlangsung Seru." *Republika Online*, October 20, 2017. <https://republika.co.id/share/oy2nsp330>.
- "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim, Provinsi Berbasis Religius." Accessed December 8, 2023. <https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/06/17/jatim-provinsi-berbasis-religius/>.
- Bilal Ramadhan, Dadang Kurnia. "Khofifah Minta Dukungan Muslimat NU Untuk Jadi Gubernur | Republika Online." Accessed December 12, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/p1i7sy330/khofifah-minta-dukungan-muslimat-nu-untuk-jadi-gubernur>.
- Cahyono, Sofyan. "Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim - Jawa Pos." *Khofifah: Yang Sakti Muslimat NU Jatim - Jawa Pos*, July 16, 2018. <https://www.jawapos.com/pemilihan/0168480/khofifah-yang-sakti-muslimat-nu-jatim>.
- Hantoro, Juli. "Kata Muslimat NU, Mendukung Khofifah-Emil Itu Untuk Dunia-Akhirat." *Tempo*, April 9, 2018. <https://pilkada.tempo.co/read/1077852/kata-muslimat-nu-mendukung-khofifah-emil-itu-untuk-dunia-akhirat>.
- Indonesia, Tim CNN. "Gus Ipul Vs Khofifah: Duel Klasik Poros NU di Pilgub Jatim." *nasional*. Accessed December 10, 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626194850-32-309211/gus-ipul-vs-khofifah-duel-klasik-poros-nu-di-pilgub-jatim>.

Indonesia, Tim CNN. “Khofifah Tegaskan Maju Pilgub Jatim 2018 di Depan Muslimat NU.” nasional. Accessed December 12, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171104202130-32-253510/khofifah-tegaskan-maju-pilgub-jatim-2018-di-depan-muslimat-nu>.

“Kesalahpahaman tentang Politik Identitas | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi.” Accessed December 15, 2023. <https://www.uinjkt.ac.id/id/kesalahpahaman-tentang-politik-identitas>.

“KPU - Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2018.” Accessed December 10, 2023. <https://datapemilu.kpu.go.id/pilkada2018>.

kumparan. “Pertarungan Sengit Gus Ipul vs Khofifah di Jawa Timur.” Accessed December 10, 2023. <https://kumparan.com/kumparanews/pertarungan-sengit-gus-ipul-vs-khofifah-di-jawa-timur>.

Media, Abdul Jalil. “Khofifah Klaim Dukungan Muslimat NU Solid.” Harianjogja.com. Accessed February 27, 2024. <https://news.harianjogja.com/read/2018/05/07/500/914779/khofifah-klaim-dukungan-muslimat-nu-solid>.

Meidiana, Dinar. “Politik Identitas. Agama dan Etnisitas dalam Dinamika Politik Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Jakarta, August 15, 2022. <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2022/08/politik-identitas-agama-dan-etnisitas-dalam-dinamika-politik-indonesia/>, (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

Merdeka.com. “MUI pertanyakan dasar fatwa fardhu 'ain pilih Khofifah di Pilgub Jatim,” June 7, 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/mui-pertanyakan-dasar-fatwa-fardhu-ain-pilih-khofifah-di-pilgub-jatim.html>, (diakses pada tanggal 9 Maret 2024).

NN, Tim. “Politik Identitas NU di Pilgub Jatim Nusantaranews.” Nusantaranews (blog). Accessed December 10, 2023. <https://nusantaranews.co/politik-identitas-nu-di-pilgub-jatim/>.

NU Online. “Politik Identitas dalam Kacamata Islam.” Accessed December 17, 2023. <https://nu.or.id/syariah/politik-identitas-dalam-kacamata-islam-WA24N>.

- Okezone, Syaiful Islam. "Ulama dan Muslimat NU Solid Dukung Khofifah : Okezone News." <https://news.okezone.com/>, March 22, 2018. <https://news.okezone.com/read/2018/03/21/519/1876202/ulama-dan-muslimat-nu-solid-dukung-khofifah>, (diakses tanggal 27 Februari 2024).
- PETISI.CO. "Penguatan Demokrasi Lokal dan Politik Identitas : Meneropong Pilgub Jatim 2018," July 23, 2017. <https://petisi.co/penguatan-demokrasi-lokal-dan-politik-identitas-meneropong-pilgub-jatim-2018/>.
- Prov. Jawa Timur, Kominfo. "KPU Jatim Resmi Tetapkan Dua Pasangan Cagub dan Cawagub 2018." dalam, n.d. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kpu-jatim-resmi-tetapkan-dua-pasangan-cagub-dan-cawagub-2018>, (diakses tanggal 19 oktober 2023)
- Raenputra, Ransis. "Identitas dan Politik Identitas di Indonesia." Universitas Airlangga Official Website, March 28, 2023. <https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/>.
- Reni Chandriachsja, Rendra Saputra. "Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018: Peran Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemenangan Khofifah Indar Parawansa = *Election for Governor of East Java 2018: The Role of Muslimat Nahdlatul Ulama in the Winning of Khofifah Indar Parawansa.*" *Universitas Indonesia Library*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021. <https://lib.ui.ac.id>.
- Sabrina Asril, Sakina Rakhma Diah Setiawan. "Tumbang Gus Ipul-Puti Di Jatim, Ini Rahasia Kekuatan Khofifah-Emil." Accessed December 10, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/07060761/tumbang-gus-ipul-puti-di-jatim-ini-rahasia-kekuatan-khofifah-emil>.
- Soejatmiko. "Muslimat NU Jatim Solid Dukung Khofifah Indar Parawansa - Jawa Pos." *Muslimat NU Jatim Solid Dukung Khofifah Indar Parawansa - Jawa Pos*, January 1, 2018. <https://www.jawapos.com/metropolis/017106/muslimat-nu-jatim-solid-dukung-khofifah-indar-parawansa>, (diakses tanggal 27 Februari 2024).
- "Suhu Politik Memanas, Muncul Spanduk Fatwa Untuk Rakyat Jatim." Accessed March 9, 2024. <https://majalahbuser.com/suhu-politik-memanas-muncul-spanduk-fatwa-untuk-rakyat-jatim.html>, (diakses pada tanggal 9 Maret 2024).

- “Surat Al-Hujurat Ayat 12 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 17, 2023. <https://tafsirweb.com/9782-surat-al-hujurat-ayat-12.html>.
- “Surat Al-Hujurat Ayat 13 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed October 24, 2023. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2023).
- “Surat Ali ‘Imran Ayat 103 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed March 1, 2024. <https://tafsirweb.com/1235-surat-ali-imran-ayat-103.html>.
- Syailendra Persada, Kukuh S. Wibowo. “Fatwa Fardu Ain Dilaporkan Polisi, Ini Reaksi Tim Khofifah-Emil - Pilkada Tempo.Co.” Accessed December 10, 2023. <https://pilkada.tempo.co/read/1099562/fatwa-fardu-ain-dilaporkan-polisi-ini-reaksi-tim-khofifah-emil>
- Tribunnews.com. “Kiai NU Gresik Totalitas Dukung Khofifah-Emil di Pilgub 2018,” March 1, 2018. <https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/01/kiai-nu-gresik-totalitas-dukung-khofifah-emil-di-pilgub-2018>, (diakses tanggal 26 Oktober 2023).
- Ulfa Rahayu, Anggi Kusumadewi. “Manuver Garang Muslimat NU di Timur Jawa.” kumparan. Accessed December 12, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/manuver-garang-muslimat-nu-di-timur-jawa-27431110790541303>.
- Zahroh, Fatimatuz. “Muslimat dan Fatayat di Jombang Serukan Dukungan untuk Khofifah-Emil.” Surya.co.id. Accessed February 27, 2024. <https://surabaya.tribunnews.com/2018/03/29/muslimat-dan-fatayat-di-jombang-serukan-dukungan-untuk-khofifah-emil>.
- . “Solid Mendukung, Muslimat Mojokerto Sebut Khofifah Mampu Menata Umat.” Tribunjatim.com. Accessed February 27, 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2018/04/07/solid-mendukung-muslimat-mojokerto-sebut-khofifah-mampu-menata-umat>.
- Zumrotul, Abidin. “Relawan Muslimat Surabaya Siap Menangkan Khofifah-Emil,” March 22, 2018. <https://www.suarasurabaya.net/road-to-grahadi/2018/Relawan-Muslimat-Surabaya-Siap-Menangkan-Khofifah-Emil/>, (diakses pada tanggal 25 februari 2024).